



**PENGARUH PENGELUARAN INFRASTRUKTUR  
DAN TENAGA KERJA TERHADAP  
PENANAMAN MODAL ASING  
DI PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2012-2018**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**MURNI LUBIS  
NIM. 16 402 00256**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**PENGARUH PENGELUARAN INFRASTRUKTUR  
DAN TENAGA KERJA TERHADAP  
PENANAMAN MODAL ASING  
DI PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2012-2018**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

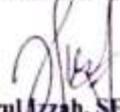
**MURNI LUBIS  
NIM. 16 402 00256**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag  
NIP.19730311 200112 1 004**

**PEMBIMBING II**

  
**Nurul Izzah, SE., M.Si  
NIP. 19900122 201801 2 003**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4.5 Sibolang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0638) 22000 Fax (0638) 24602

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n.Murni Lubis  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Agustus 2020  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n.Murni Lubis yang berjudul "Pengaruh pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2018". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

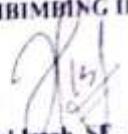
Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag  
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

  
Nurul Izzah, SE., M.Si  
NIP. 19900122 201801 2 603

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MURNI LUBIS  
NIM : 1640200256  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Infrastruktur dan Tenaga Kerja terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2018

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 November 2020  
Saya yang Menyatakan,



*Murni Lubis*  
MURNI LUBIS  
NIM. 1640200256

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : MURNI LUBIS  
NIM : 1640200256  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pengaruh Pengeluaran Infrastruktur dan Tenaga Kerja Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2018"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 18 November 2020  
Yang menyatakan,



**MURNI LUBIS**  
**NIM. 1640200256**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : MURNI LUBIS  
NIM : 1640200256  
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah (IE-1)  
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pengeluaran Infrastruktur dan Tenaga Kerja Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2018

Ketua

Nofinawati, MA  
NIP. 19821116 201101 2 003

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd  
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Nofinawati, MA  
NIP. 19821116 201101 2 003

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd  
NIP. 19830317 201801 2 001

Dr. Budi Gautama Siregar, M.M  
NIP. 19790720 201101 1 005

Nurul Izzah, S.E., M.Si  
NIP. 19900122 201801 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa/ 01 Desember 2020  
Pukul : 15.00 WIB s/d 17.00 WIB  
Hasil/Nilai : Lulus/70,75(B)  
Index Prestasi Kumulatif : 3,36  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sialang, Padangsidimpuan 22733  
Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

### PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENGELUARAN INFRASTRUKTUR  
DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENANAMAN  
MODAL ASING DI PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2012-2018**

**NAMA : MURNI LUBIS**  
**NIM : 16 402 00256**

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 25 Desember 2020  
Dekan  
  
**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama** : MURNI LUBIS  
**NIM** : 16 402 00256  
**Program Studi** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : Pengaruh Pengeluaran Infrastruktur dan Tenaga Kerja Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2018.

Pengeluaran infrastruktur di Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 turun, sedangkan data PMA naik dari data tersebut tidak sesuai teori. Di Kabupaten Depok pada tahun 2018 data pengeluaran infrastruktur naik, sedangkan data PMA turun jadi data tersebut tidak sesuai teori. Selanjutnya pada tahun 2018 data PMA di Kabupaten Karawang turun sedangkan data tenaga kerja naik, jadi data tersebut tidak sesuai dengan teori. Di Kabupaten Depok pada tahun 2016 data tenaga kerja turun, sedangkan data PMA naik jadi data tersebut tidak sesuai dengan teori

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan pada teori investasi, jenis-jenis investasi, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Wihardjo yaitu ada hubungan positif antara investasi atau penanaman modal asing dengan tenaga kerja atau kesejahteraan masyarakat. Investasi atau penanaman modal terbagi dua yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pengukuran rasio. Dimana dalam penelitian ini adalah data panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 sampel. Pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Eviews 9* dengan teknik analisis data yang digunakan adalah uji chow, uji hausman, uji langrange multiplier, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji t dan uji F), uji koefisien determinasi  $R^2$ , dan uji Regresi berganda.

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja secara uji parsial terhadap penanaman modal asing. Dan terdapat pengaruh pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja secara uji simultan terhadap penanaman modal asing. Hasil  $R^2$  sebesar 0.478863 hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja sebesar 47,88% persen. Sedangkan sisanya 52,12% persen di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat dan diluar Provinsi Jawa Barat, karena peran infrastruktur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penanaman modal asing.

**Kata Kunci** : Pengeluaran Infrastruktur, Tenaga Kerja, PMA.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Pengaruh Pengeluaran Infrastruktur Dan Tenaga Kerja Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Jawa Barat**”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak jarang penulis menemukan kesulitan dan hambatan. Namun, berkat arahan dan bimbingan para dosen dan berkat do’a dan bantuan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas semua bantuan dari pihak-pihak yang telah berjasa, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar, MA., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag., selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A, selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari, M.A sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Ibu Nurul Izzah M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag sebagai dosen pembimbing I, saya ucapkan banyak terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, semangat, bimbingan dan pengarahan dalam penelitian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah bapak berikan.
5. Ibu Nurul Izzah, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing II, saya ucapkan banyak terimakasih, karena telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah ibu berikan.

6. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Sueb Lubis dan Ibunda Nuraini Nasution yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Serta yang telah berjuang untuk menyekolahkan kami anak-anaknya. Semoga Allah membalas segala amal kebaikan mereka dengan Firdaus-Nya.
9. Kepada abang saya Enda Lubis dan kakak Inun Lubis yang telah memberi dukungan moral dan material dalam setiap penyelesaian penulisan skripsi dan adik-adik saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat. Semoga Allah membalas segala amal kebaikan mereka dengan Firdaus-Nya.
10. Sahabat paling dekat saya Risky Florensa Siregar, Siti Ombun Harahap, Nurul Armia Gultom dan Wahdana Hasibuan yang selalu membantu dalam penyelesaian penulisan dan memberikan arahan penulisan skripsi serta dukungan semangat dalam penyelesaian penulisan. Semoga Allah balas segala amal kebbaikannya.
11. Sahabat dan Teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi-1 angkatan 2016 yang telah memberikan informasi dan dukungan serta kepada teman saya

Nurhalimah, Sakinah dan Risda yang selalu sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi, teman-teman saya Risky, Ombun dan Wahdana yang meluangkan waktu dalam proses penyelesaian penulisan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan      Agustus 2020

Peneliti,

**Murni Lubis**  
**Nim. 16 402 00256**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـــــــ /	Fathah	A	A
ـــــــ /	Kasrah	I	I
ـــــــ و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Definisi Operasional Variabel .....	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Kegunaan Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori .....	15
1. Investasi .....	15
a. Pengertian Investasi.....	15
b. Teori investasi menurut ahli.....	21
c. Jenis-jenis investasi.....	22
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi.....	23
e. Investasi menurut ekonomi Islam .....	24
2. Pengeluaran Pemerintah.....	26
a. Pengertian pengeluaran pemerintah .....	28
b. Teori pengeluaran pemerintah.....	30

c. Pengeluaran pemerintah dalam Islam .....	33
3. Tenaga kerja .....	34
a. Pengertian tenaga kerja .....	34
b. Teori ketenagakerjaan .....	36
c. Tenaga kerja dalam Islam .....	38
B. Penelitian terdahulu .....	40
C. Kerang kapikir .....	43
D. Hipotesis .....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
B. Jenis Penelitian .....	46
C. Populasi dan Sampel.....	46
1. Populasi .....	46
2. Sampel.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Analisa Data.....	48
1. Pemilihan model estimasi data panel .....	48
2. Pengujian asumsi klasik .....	51
3. Uji hipotesis .....	52
4. Uji koefisien determinasi .....	53
5. Analisa regresi berganda data panel .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat .....</b>	<b>55</b>
1. Sejarah Singkat Provinsi Jawa Barat.....	55
2. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Barat .....	56
3. Kondisi Demografis Provinsi Jawa Barat .....	57
4. PDRB Provinsi Jawa Barat .....	58
<b>B. Gambar Umum Variabel Penelitian .....</b>	<b>59</b>
<b>C. Hasil Estimasi .....</b>	<b>64</b>
1. Pemilihan model estimasi data panel .....	64
a. Uji chow .....	65
b. Uji hausman test.....	66
c. Uji LM.....	67
2. Uji Asumsi Klasik .....	68
a. Statistik Deskriptif .....	68
b. Uji Normalitas .....	69
c. Uji Multikolinearitas .....	70
d. Uji utokorelasi .....	71
e. Uji heteroskedastisitas.....	72
3. Uji Hipotesisi .....	74
a. Uji t .....	74

b. Uji F .....	75
c. Koefisien Determinasi.....	76
4. Hasil Estimasi Regresi Berganda .....	77
<b>D. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>79</b>
<b>E. Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>82</b>

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal dari investasi pada aset yang lama. Dari pengertian tersebut kegiatan investasi dapat dilakukan secara langsung (*direct investment*) maupun secara tidak langsung, yang lebih dikenal dengan (*portofolio investment*). Investasi secara tidak langsung (*portofolio investment*) biasanya dilakukan dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal, sedangkan investasi secara langsung (*direct investment*) dilakukan dengan cara ikut menguasai dan menjalankan (mengelola) langsung investasi.

Penanaman modal atau investasi merupakan tahapan awal dari proses produksi, pada hakekatnya investasi juga merupakan tahapan awal dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan kondisi perekonomian disebuah negara. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara senantiasa menciptakan iklim investasi yang mengairahkan. Sasaran yang dituju bukan hanya pihak negeri maupun swasta di dalam negeri tapi juga pihak investor asing. Tingginya investasi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi, selain itu investasi juga mendorong kemajuan teknologi dan spesialisasi dalam proses produksi sehingga menimbulkan ongkos produksi dan industrialisasi serta ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan daerah.

Iklim investasi Indonesia yang semakin baik dan kondisi geografis Indonesia yang sangat menggairahkan bagi para investor asing membuat Indonesia menjadi sasaran para investor untuk dapat menanamkan modalnya di daerah-daerah Indonesia yang berpotensi tinggi. Namun keadaan demografis, geografis, dan kemajuan ekonomi dan tidak sama menyebabkan perbedaan kinerja pembangunan antar daerah menjadi tidak sama.

*United Nations Conference Trade and Development* (UNCTAD) menyebutkan pada tahun 2014 Asia bagian Timur (terdiri dari Asia Timur dan Asssia Tenggara) merupakan salah satu wilayah tujuan investasi asing (PMA) terbesar di dunia. Di wilayah ASEAN, China menduduki poisi pertama PMA dengan porsi sebanyak 17 persen, Indonesia berada di peringkat kedua setelah China sebagai tujuan Investasi dunia.

Sri Redjeki Hartono mengatakan investasi adalah pengorbanan rupiah sekarang demi mendapatkan rupiah yang lebih banyak di waktu yang akan datang atau mendatang, karena adanya tindakan usaha dalam perjalanan waktu. Sadono Sukirno mengemukakan, investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perlengkap produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.<sup>1</sup>

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi, yang sebenarnya sama pentingnya dengan faktor-faktor produksi

---

<sup>1</sup>Samuelson, *Makro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 122.

umum lainnya yakni modal dan tenaga kerja. Namun untuk satu faktor ini, selama ini terutama sejak krisis ekonomi 1997/1998, kurang sekali perhatian pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, khususnya di wilayah di luar Jawa, atau kawasan Indonesia. Hal ini karena setelah krisis pemerintah harus fokus pada hal-hal yang lebih mendesak seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ekonomi secara keseluruhan, mencegah pelarian modal, menanggulangi hutang luar negeri serta menstabilkan kembali kondisi politik dan sosial. Akibatnya, kondisi infrastruktur terpuruk di mana-mana. Mutu infrastruktur di Indonesia menduduki peringkat terendah di kawasan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi asing, pengentasan kemiskinan dan mutu lingkungan hidup.

Akhir-akhir ini masyarakat banyak mengeluhkan kondisi infrastruktur khususnya jalan yang saat ini dirasakan sangat mengganggu arus lalu lintas jika mereka pergi bekerja atau mengirimkan barang yang akan di jual ke pasar domestik atau untuk diekspor. Kemacetan yang terus menerus terjadi menyebabkan ketidakefisien waktu dalam berkendara dan terganggunya distribusi barang dan jasa. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, jumlah ruas jalan yang ada saat ini sudah tidak sepadan dengan jumlah kendaraan yang terus mengalami peningkatan.

Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan suatu daerah dalam membangun ekonominya adalah rendahnya daya tarik suatu daerah dan sumber daya yang di karenakan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur, sehingga menyebabkan tingkat aktivitas ekonomi yang rendah. Suatu daerah

yang tidak memiliki sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam serta kurangnya insentif yang ditawarkan (prasarana infrastruktur, perangkat keras dan lunak, dan keamanan) dapat menyebabkan suatu daerah tertinggal dalam pembangunan.

Untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya, terdapat beberapa alternatif pembangunan suatu daerah. Alternatif pengembangan suatu daerah. Alternatif tersebut berupa investasi langsung yang diarahkan pada sektor produktif atau investasi pada *social-overhead* seperti pada pembangaunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana infrastruktur lainnya. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur harus diperhatikan, karena infrastruktur merupakan basis pembangunan.

Tenaga kerja meupakan persoalan klasik yang dihadapi setiap negara terutama negara berkembang. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk harus diiringi oleh banyaknya lapangan kerja baru yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Jumlah penduduk yang banyak menjadi beban bagi suatu negara apabila tidak mampu menggali dan menggunakan potensi yang ada pada sumber daya manusianya.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan dan mampu untuk bekerja serta memenuhi persyaratan peraturan perburuhan suatu negara<sup>2</sup>. Luasnya lapangan kerja yang tersedia akan ditentukan oleh kebijakan investasi prduksi yang dihasilkan dan cara pembangunan yang diterapkan apakah *labour intensive* atau *capital intensive*

---

<sup>2</sup> Julius, R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global* (Jakarta: Mitra Wacana Media 2015), hlm. 56

serta besarnya modal yang diinvestasikan. Lapangan kerja yang ada di negara-negara yang sedang berkembang sangat terbatas akibat daripada kebijaksanaan investasi, produksi yang dihasilkan, besarnya modal yang diinvestasikan, dan situasi perekonomian nasional dan internasional. Kebijakan investasi yang dilakukan pada masa lalu ditunjukkan kepada sektor pertanian demi kepentingan negara penjajah, sedangkan lapangan kerja yang tercipta pada sektor ini sangat kecil. Produksi yang dihasilkan adalah produksi primer dari pertanian dan ekstraktif mineral dari pertambangan yang proses produksinya pendek, sehingga lapangan kerja yang tercipta sedikit.

Pertumbuhan penanaman modal asing yang terjadi di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2018, dengan melihat perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun apakah mengalami kemajuan atau penurunan dalam penanaman modal asing.

**Tabel 1.1**  
**Penanaman Modal Asing di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat**  
**(US\$/Ribu)**

Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Karawang	9.001	36.272	38.964	42.813	47.648	11.435	11.635
Bekasi	16.38	17.781	22.558	28.039	30.221	6.997	26.443
Bogor	2.678	2.696	3.103	3.256	4.793	2.001	7.213
Bandung	10.267	18.383	18.884	20.914	22.802	52.843	3.927
Depok	20.983	445.521	36.956	40.234	45.721	12.800	3.616

Sumber : BPS. Jawa Barat dalam angka

Tabel tersebut menunjukkan pertumbuhan penanaman modal asing di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Pada Kabupaten/Kota Bandung dan Depok menurun pada tahun 2018. Kabupaten Karawang tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kabupaten Bekasi tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Investasi PMA Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 mencapai USD 5,47 miliar dengan negara penanaman modal terbesar adalah Jepang dengan nilai USD 2,86 miliar. Realisasi investasi PMDN mencapai USD 1,17 miliar. Pertumbuhan Investasi PMA Provinsi Jawa Barat tersebut didukung oleh peningkatan laju pertumbuhan PMA, sementara pertumbuhan PMDN masih mengalami perlambatan. Peningkatan laju pertumbuhan PMA, didorong oleh investasi pada industri alat angkutan dan industri makanan. Disisi lain, perlambatan laju PMDN disebabkan oleh menurunnya investasi pada industri kimia dan industri makanan. PMA dan PMDN terbesar disalurkan ke wilayah yang merupakan basis industri seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor.

Infrastruktur ekonomi merupakan pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi yang terdiri dari public work (jalan, bendungan, drainase dll), dari pembangunan listrik yang paling vital dalam peningkatan aktivitas pembangunan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur jalan. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Pertumbuhan pengeluaran infrastruktur yang terjadi di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2018, dengan melihat

perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun apakah mengalami kemajuan atau penurunan dalam pengeluaran infrastruktur.

**Tabel 1.2**  
**Pengeluaran Infrastruktur di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat**  
**(Ribu Rupiah)**

Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Karawang	2.416.221	2.762.122	3.151.310	3.800.189	4.095.043	2.252.000	4.234.010
Bekasi	2.639.024	3.276.762	3.761.216	4.356.924	5.156.509	700.000	885.000
Bogor	3.674.001	4.614.271	4.899.883	6.262.702	7.169.234	3.873.000	1.383.000
Bandung	2.850.023	3.242.165	3.823.065	4.402.406	4.236.100	3.873.000	4.103.000
Depok	2.839.267	2.508.342	2.120.265	2.101.280	2.201.350	1.712.000	4.205.000

Sumber : BPS. Jawa Barat dalam angka

Tabel tersebut menunjukkan pertumbuhan pengeluaran infrastruktur di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2012-2018. Pada wilayah Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan pengeluaran infrastruktur tertinggi yaitu pada tahun 2012-2016. Kemudian di ikuti Kabupaten Bekasi yang berkurang Rp. 700.000 pada tahun 2017. Dan Kabupaten Depok mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 4.205.000 pada tahun 2018.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing maka akan menambah lapangan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2018, dengan melihat perbandingan yang terjadi

dari tahun ke tahun apakah mengalami kemajuan atau penurunan dalam tenaga kerja.

**Tabel 1.3**  
**Tenaga Kerja di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat**  
**(Ribu Rupiah)**

<b>Kabupaten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Karawang	1.033.921	985.178	1.026.868	987.688	1.121.234	1.010.828	1.026.586
Bekasi	1.200.377	1.366.570	1.389.958	1.494.680	1.543.343	1.399.743	1.472.432
Bogor	2.193.981	2.131.478	2.315.176	2.315.088	2.317.087	2.485.185	2.537.583
Bandung	1.171.551	1.185.47	1.192.770	1.192.521	1.192.573	1.219.398	1.758.241
Depok	828.909	906.390	958.857	960.253	965.721	969.502	1.758.241

Sumber : BPS. Jawa barat dalam angka

Tabel tersebut menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2018. Adapun daerah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu pada Kabupaten Bogor pada tahun 2012-2018. Sedangkan Kabupaten Bandung mengalami peningkatan pada tahun 2012-2016 tetapi beda pada tahun 2017-2018 justru mengalami penurunan Rp. 26.825.

Menurut teori jika PMA naik maka pengeluaran infrastruktur naik dan sebaliknya jika PMA turun maka infrastruktur turun. Begitu juga dengan tenaga kerja, jika PMA naik maka tenaga kerja naik, sebaliknya jika PMA turun maka tenaga kerja turun. Di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 data pengeluaran infrastruktur turun, sedangkan data PMA naik dari data tersebut tidak sesuai teori. Di Kabupaten Bandung pada tahun 2017 data pengeluaran infrastruktur turun, sedangkan data PMA naik jadi data tersebut tidak sesuai teori. Di Kabupaten Depok pada tahun 2018 data pengeluaran infrastruktur naik, sedangkan data PMA turun jadi data tersebut tidak sesuai teori. Selanjutnya pada tahun 2017 data PMA di Kabupaten Karawang turun

sedangkan data tenaga kerja turun, jadi data tersebut sesuai dengan teori. Di Kabupaten Bandung pada tahun 2018 data tenaga kerja turun, sedangkan data PMA turun jadi data tersebut sesuai dengan teori. Pada data PMA di Kabupaten Depok pada tahun 2014, 2017 dan tahun 2018 turun, sedangkan data tenaga kerja naik jadi data tersebut tidak sesuai teori.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemamparan diatas, masalah-masalah yang peneliti temukan adalah:

1. Pertumbuhan Investasi PMA di Kabupaten/Kota Bandung turun pada tahun 2018.
2. Perkembangan pengeluaran infrastuktur di Kabupaten/Kota Bogor pada tahun 2018 turun sedangkan di Kabupaten/Kota Depok data pengeluaran infrastruktur naik pada tahun 2018.
3. Perkembangan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Bogor naik pada tahun 2017 dan di Kabupaten/Kota Depok data tenaga kerja naik pada tahun 2018.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dilihat dari teori yang dicantumkan bahwa data tidak sesuai dengan teori. Data pengeluaran infrastruktur di Kabupaten/Kota Bogor pada tahun 2018 turun, sedangkan data PMA naik, data tenaga kerja di Kabupaten/Kota Depok pada tahun 2014, 2017 dan 2018 naik, sedangkan data PMA turun. Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh pengeluaran infrastuktur dan tenaga kerja terhadap penanaman

modal asing di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini hanya mengambil studi kasus di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

#### D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat suatu variabel yang dapat diukur. Dapat pula dikatakan sebagai suatu penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mengukur suatu variabel. Definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.4**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Skala Pengukuran
Pengeluaran Infrastruktur ( $X_1$ )	Pengeluaran infrastruktur merupakan suatu sarana fisik pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud dan menjadi lebih efisien. <sup>3</sup> Total pengeluaran infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat.	Rasio
Tenaga Kerja ( $X_2$ )	Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja atau mencari pekerjaan dan mampu untuk bekerja serta memenuhi persyaratan peraturan suatu negara. <sup>4</sup> Total tenaga kerja yang ada di Provinsi Jawa Barat.	Rasio
Penanaman Modal Asing (Y)	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,	Rasio

<sup>3</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 289.

<sup>4</sup>Julius R. Latamaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Glbal, edisi 1* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 56.

	<p>baik yang menggunakan modal asing seluruhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>5</sup> Total penanaman modal asing yang ada di Provinsi Jawa Barat.</p>	
--	---	--

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran infrastuktur berpengaruh terhadap penanaman modal asing di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat ?
2. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap penanaman modal asing di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat ?
3. Apakah pengeluaran infrastuktur dan tenaga kerja berpengaruh terhadap penanaman modal asing di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat ?

### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, yang dijelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran infrastuktur terhadap penanaman modal asing di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui tenaga kerja terhadap penanaman modal asing di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

---

<sup>5</sup>Pratama Rahardja Dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), Hlm. 278.

3. Untuk melihat pengaruh pengeluaran infrastuktur dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

## **G. Kegunaan Penelitian**

### 1. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peneliti tentang materi mengenai pengaruh pengeluaran infrastuktur dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing, serta untuk meningkatkan pemahaman peneliti melalui telah literatur dan data.

### 2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran infrastuktur dan penanaman modal asing.

### 3. Bagi Dunia Akademik

Sebagai bahan referensi dan menambah kepustakaan karena keterbatasan peneliti, selanjutnya diharapkan agar lebih dikembangkan lagi oleh peneliti lainnya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini dan agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

Bab I PENDAHULUAN, yang berisi tentang hal-hal yang menjadi alasan melatarbelakangi munculnya judul penelitian, identifikasi masalah yang menjelaskan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah dalam objek

penelitian, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup permasalahan, defenisi operasional variabel, penelitian mendefenisikan variabel yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya rumusan masalah, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II LANDASAN TEORI, yang memuat tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah yang dikaji, teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yakni membahas tentang teori-teori penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, peneitian terdahulu, kerangka pikir, serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian berdasarkan hasil kajian teori.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN, di dalamnya terdiri dari lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data. Lokasi dan waktu penelitian yaitu uraian yang menjelaskan penelitian yang dimulai dari awal penulisan proposal hingga penulisan laporan penelitian yang akan dilaksanakan dan karakteristiknya serta menjelaskan pendekatan yang dilakukan, yakni kuantitatif. Populasi dan sampel yaitu ada hubungannya dengan generalisasi. Namun bila jumlah populasinya besar, dapat ditetapkan sampel sesuai dengan aturan yang ada dalam metodologi penelitian. Jenis dan sumber data menjelaskan jenis data yang digunakan dan sumber data yang digunakan. Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan bentuk sumber data dan jenis pendekatan penelitian. Untuk penelitian dokumentasi, pengumpulan

datanya dilakukan dengan menelaah buku-buku atau arsip yang ada dan bahan lainnya yang menjadi sumber data.

Bab IV HASIL PENELITIAN yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat

Bab V PENUTUP berisi uraian tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat serta saran-saran terhadap hasil penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Investasi**

###### **a. Pengertian Investasi**

Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi merupakan konsep aliran (*flow concept*), karena besarnya dihitung selama satu interval periode tertentu. Tetapi investasi akan memengaruhi jumlah barang modal yang tersedia (*capital stock*) pada satu periode tertentu. Tambahan stok barang modal adalah sebesar pengeluaran investasi satu periode sebelumnya.<sup>6</sup>

Investasi swasta terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu pihak swasta yang mempunyai modal dalam negeri baik perorangan maupun badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu investasi yang diperoleh dari negara luar yang mempunyai fungsi sebagai pemacu untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>7</sup>

UU penanaman modal No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari investasi, baik investasi PMDN (Penanaman

---

<sup>6</sup>Pratama Rahardja Dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi) Edisi Ketiga* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 270.

<sup>7</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 278.

Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang selanjutnya juga akan pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinyu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. Menurut negara asalnya, penanaman modal atau investasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

a) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMDN dengan menggunakan modal dalam negeri. Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu komponen laporan keuangan daerah, struktur APBD menurut kepmendagri No. 29 Tahun 2002 merupakan satu kesatuan yang terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Struktur APBD diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki oleh daerah.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai

---

<sup>8</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52.

manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Berikut adalah yang termasuk dalam belanja modal.

- 1) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh untuk siap pakai. Perolehannya dengan cara mengeluarkan biaya harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.<sup>9</sup>
- 2) Peralatan dan mesin merupakan mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh investasi kantor, dan peralatan lain yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan serta dalam kondisi siap pakai. Hal-hal yang mengubah nilai peralatan dan mesin adalah penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. Dalam pencatatannya harus dibuat ketentuan yang berbeda antara hal-hal yang mengubah nilai tersebut.
- 3) Gedung dan bangunan yaitu mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Hal-hal yang mengubah nilai gedung dan bangunan adalah penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

---

<sup>9</sup>Reza Lainatul Rizky, Dkk, *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia*, Vol. 8, 1 (Universitas Negeri Malang, 2016), hlm. 12.

- 4) Jalan, irigasi dan jaringan yaitu aset yang dimiliki atau dikuasai pemerintah berupa jalan, irigasi, dan jaringan dalam keadaan siap pakai.
  - 5) Aset tetap lainnya yaitu mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap yang telah disebutkan diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah kedalam kondisi siap pakai dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap lainnya dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lain dan dari sitaan atau rampasan.
- b) Penanaman Modal Asing (PMA)<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 9 tentang penanaman modal asing, PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMA, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya yang berpatungan dengan PMDN. Menurut salim dan budi, PMA merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain atau pemindahan modal. Tujuan pemindahan modal ini digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian.

---

<sup>10</sup>Pratama Rahardja Dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 278.

Menurut UU No. 1 Tahun.1967 dan UU No. 11 Tahun. 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Bentuk modal asing adalah bentuk valuta asing, alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia, dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pemilik modal asing dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Negara asing, merupakan negara yang berasal dari luar negeri, yang menanamkan investasinya di Indonesia.<sup>11</sup>
- 2) Perseorangan warga negara asing, merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasi di Indonesia.
- 3) Badan usaha asing, merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 148-149

- 4) Badan hukum asing, merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Act yang berlaku di negara asing tersebut.
- 5) Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Dalam pasal 3 sampai pasal 6 peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, hal-hal yang diatur dalam ketentuan itu antara lain:

- 1) Jangka waktu berusaha

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 tahun, terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial dan dapat diperbaharui izinnya.

- 2) Lokasi usaha

Lokasi usaha bagi penanam modal asing adalah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bagi daerah yang telah ada kawasan industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan dalam kawasan tersebut (pasal 5).

- 3) Dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak (pasal 5).

- 4) Besarnya saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan dalam bentuk patungan adalah sekurang-kurangnya 5

persen dari seluruh modal disektor perusahaan pada waktu pendirian (pasal 6)

## **b. Teori Investasi Menurut Ahli**

### a) Teori Investasi Harrod-Domar

Pembentukan modal atau investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Pada kegiatan investasi terdapat hubungan yang erat terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru, karena akan memunculkan kegiatan produksi yang meningkat sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### b) Teori Investasi Wihardjo

Wihardjo menyatakan ada hubungan positif antara investasi atau penanaman modal asing dengan tenaga kerja atau kesejahteraan masyarakat. Investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### c. Jenis-Jenis Investasi

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya.

#### a) Investasi berdasarkan asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis yaitu: *real asset* (investasi berwujud) dan *financial asset* (berupa dokumen).<sup>12</sup>

#### b) Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya terbagi dua macam, yaitu: investasi autonomus (berdiri sendiri) misalnya pembelian surat berharga, investasi induced (mempengaruhi-menyebabkan) yang dipengaruhi tingkat pendapatan misalnya pengasilan yang didapat selain bekerja.

#### c) Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini terbagi dua, yaitu: investasi yang bersumber dari modal asing, dan investasi dari modal dalam negeri.

---

<sup>12</sup>Salim, *Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 36.

d) Investasi berdasarkan bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada acara menanamkan investasinya. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: investasi portofolio dan investasi langsung.<sup>13</sup>

**d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Investasi**

a) tingkat pengembalian yang diharapkan<sup>14</sup>

1) Kondisi internal perusahaan

Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada dibawah kontrol perusahaan, misalnya tingkah efisiensi, kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi.

2) Kondisi eksternal perusahaan

Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembalian keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Jika perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia bernada optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena tingkat pengembalian

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 37-38.

<sup>14</sup>Pratama Rahardja Dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi Dan Makroekonomi) Edisi Ketiga*, hlm. 278.

investasi dapat dinaikkan. Selain perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga dapat menentukan tingkat investasi. Kebijakan menaikkan pajak, misalnya, diperkirakan akan menurunkan tingkat permintaan akan agregat. Akibatnya tingkat investasi akan menurun, faktor sosial politik juga menentukan investasi. Jika sosial politik makin stabil, investasi umumnya juga akan meningkat. Demikian pula faktor keamanan (kondisi keamanan negara).

b) Biaya Investasi

Biaya investasi dapat ditentukan dari tingkat bunga pinjaman apabila semakin tinggi maka biaya investasi semakin mahal. Akibatnya minat berinvestasi semakin menurun. Namun, tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasinya tetap rendah.<sup>15</sup>

**e. Investasi Menurut Ekonomi Islam**

Metwally menyebutkan bahwa investasi di negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai berikut:

- a) Ada sanksi untuk pemegang aset kurang tidak produktif (*hoarding idle assets*)
- b) Dilarang melakukan berbagai macam bentuk spekulasi dan segala macam judi.

---

<sup>15</sup>Pratama Rahardja Dan Mandalan Manurung, *Op. Cit.*, hlm. 279.

c) Tingkat bunga untuk berbagai macam pinjaman adalah nol dan sebagai gantinya dipakai sistem bagi hasil.<sup>16</sup>

Dari tiga kriteria diatas menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, tingkat bunga tidak masuk dalam perhitungan investasi. Karena itu, ongkos oportunitas (*opportunity cost*) dana untuk tujuan investasi adalah tingkat zakat yang dibayarkan atas dana tersebut. Dengan kata lain, tabungan yang tidak disalurkan ke investasi nyata, maka seseorang akan terbebani zakat (seperti yang telah ditentukan).<sup>17</sup>

Investasi dalam pandangan Islam ada tiga sudut pandang: yakni individu, masyarakat, dan agama.

#### 1) Individu

Investasi merupakan kebutuhan fitrah, dimana setiap individu, pemilik modal (uang).Setiap individu berkeinginan untuk menikmati kekayaannya dalam waktu seluas mungkin.Jadi invesatasi merupakan jembatan bagi individu dalam rangka memenuhi kebutuhan fitrah.

#### 2) Masyarakat

Investasi bagi masyarakat adalah keuntungan sosial, dimana kebutuhan masyarakat yang kompleks, dengan persediaan sumber daya yang masih mentah dan mengharuskan untuk investasi.Sebagai Firman Allah SWT dalam surah Al-Jaatsiyah (45: 13).

---

<sup>16</sup>Eko, Suprayitno, *Ekonomi Islam, Edisi Pertama*(Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), hlm. 125-128.

<sup>17</sup>*Ibid.*,hlm. 135.

سَتَذِلكَ فِي إِنِّ مِّنْهُ جَمِيعاً أَلأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لَكُمْ وَسَخَّرَ  
 بِتَفَكُّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَٓ

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah menyediakan sumberdaya yang mentah dan optimalisasinya tergantung pada manusia yang berfikir. Dalam penjelasan tersebut bahwa manusialah yang akan mengelola sumber daya yang telah Allah ciptakan untuk manusia dalam mendapatkan kesejahteraan hidup.

### 3) Agama Islam

Investasi merupakan kewajiban syariat, yang taruhannya pahala dan dosa.<sup>19</sup>

## 2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta, 2007), hlm. 499.

<sup>19</sup>Masyhuri Macfuddz &M, Nurhadi Sujoni, *Teori Ekonomi Makro*(Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 122-123.

yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakantersebut.<sup>20</sup>

Pengeluaran pemerintah yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya seluruh perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>21</sup>

Pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pengeluaran rutin, berupa belanja pegawai (gaji, pensiun, uang makan, uang jalan), belanja barang (kertas, mobil, pemeliharaan gedung), pembayaran bunga hutang (dalam negeri dan luar negeri), subsidi-subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.
- b. Pengeluaran pembangunan, yaitu yang tujuannya untuk memajukan kegiatan ekonomi di bidang industri, pertanian, perhubungan,

---

<sup>20</sup>Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik*(Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm. 169.

<sup>21</sup>Merry Anitasari Dan Ahmad Soleh, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu*, Vol. 3, 2 (Ekonomi Dan Bisnis, 2015), hlm. 119.

<sup>22</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Edisi Revisi*(Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 140.

kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja. Pengeluaran pembangunan sebagian besar digolongkan sebagai investasi dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan. Infrastruktur untuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rumah sakit, dan sekolah. Infrastruktur merupakan suatu sarana pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Deni Friawan menjelaskan ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan investasi. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia.

Investasi dari sektor swasta membutuhkan waktu, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian pada peningkatan investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi, salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur. Peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti dengan efektifitas dan efisiensi dari pengeluaran

tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang di bangun dan agar terciptanya transparansi dalam proses pengadaan barang dan pembangunan.

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu:

#### 1) Peran alokatif

Peran alokatif yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Dalam kehidupan ekonomi, setiap orang atau masyarakat selalu mempunyai preferensi tertentu terhadap barang-barang dan jasa yang ingin dikonsumsi atau hendak diproduksinya. Pemerintah harus merencanakan peruntukan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya.<sup>23</sup>

#### 2) Peran distributif pemerintah

Peran distributif pemerintah yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil, hasil ekonomi secara adil dan wajar. Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak

---

<sup>23</sup>Dumairy, *Op. Cit.*, hlm. 158-159

dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian diretribusi secara adil dan proporsional.<sup>24</sup>

### 3) Peran stabilisatif pemerintah

Peran stabilisatif yaitu, peranan pemerintah dalam memelihara stabilisatif perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.

### 4) Peran dinamisatif pemerintah

Peran dinamisatif yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.<sup>25</sup>

## **a. Teori Pengeluaran Pemerintah**

### a) Teori Keynes

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes dapat ditelaah bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terperkerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah perlu

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 160.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 170.

menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan pihak swasta.<sup>26</sup>

b) Teori Adolph wagner

Adolph wagner mengemukakan suatu hukum yang disebut dengan “*law of ever increasing state activity*” (hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah). Dari penelitiannya di beberapa negara maju pada abad 19 ternyata bahwa pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun baik dalam arti uang maupun secara riil secara absolut maupun relatif dalam perbandingannya dengan pendapatan nasional (GNP) yang disebabkan oleh adanya perkembangan sosial, maupun berkembangnya industri.<sup>27</sup>

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebabnya adalah:

- 1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan.
- 2) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.
- 3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi.
- 4) Perkembangan demokrasi.
- 5) Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 161.

<sup>27</sup>Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 22-23.

c) Teori Rostow dan Musgrave

Teori ini menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

d) Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka

membayar pajak yang semakin besar.<sup>28</sup> Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Menurut teori jika PMA naik maka pengeluaran infrastruktur naik dan sebaliknya jika PMA turun maka infrastruktur turun. Begitu juga dengan tenaga kerja, jika PMA naik maka tenaga kerja naik, sebaliknya jika PMA turun maka tenaga kerja turun.

#### **b. Pengeluaran Pemerintah dalam Islam**

Dalam konsep ekonomi Islam, belanja negara harus sesuai dengan syari'ah dan penentuan skala prioritas. Menurut Ibn.Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangat penting. Sejumlah pengeluaran dibutuhkan untuk menciptakan infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disediakan pemerintah juga menjalankan fungsi pada sisi permintaan pasar. Dengan permintaannya, pemerintah dapat mendorong produksi. Jika pemerintah menghentikan pengeluarannya, krisis pasti akan terjadi.<sup>29</sup> Pengeluaran pemerintah sudah diatur dalam Al-Qur'an dalam surah Al-ānfal ayat 1.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا  
ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

<sup>28</sup>Dumairy, *Op. Cit.*, hlm. 163.

<sup>29</sup>Mudjarat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan Dan Politik Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 59.

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."<sup>30</sup>

Maksud dari ayat tersebut, adalah dalam buku hadist dan fiqih disebutkan bahwa sumber daya alam, kekayaan milik umum, harta rampasan perang harta yang tidak ada pemiliknya, harta orang meninggal yang tidak ada pewarisnya, hutan dan tambang disebut anfal. Sebelum datangnya Islam cara pembagian harta rampasan perang dilakukan dengan diskriminatif. Setelah datangnya Islam, Rasulullah membagi harta rampasan perang tersebut dengan adil kepada seluruh orang yang ikut dalam perang.

### **3. Tenaga Kerja**

#### **a. Pengertian Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja (berusia 15-64 Tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, menurut UU No. 13 Tahun 2003. Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga

---

<sup>30</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, 2007), hlm.177.

kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia bekerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 Tahun-64 Tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 Tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 Tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 Tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Negara-negara sedang berkembang terbagi tiga golongan yaitu:

- 1) Tenaga kerja yang produktif
- 2) Tenaga kerja yang kurang produktif
- 3) Tenaga kerja penganggur

Dari ketiga golongan tenaga kerja tersebut pada umumnya kurang produktif, karena mereka ini kurang trampil, kurang pengalaman, kurang pendidikan dan cara kerjanya pun masih tradisional.<sup>31</sup> Akibatnya produktivitas kerjanya rendah dan pendapatan mereka masih sangat rendah. Untuk meningkatkan produktivitas kerja para tenaga kerja ini, perlu dilakukan pembinaan, penyuluhan, latihan-latihan kerja, supaya mereka makin terampil dan pembangunan ekonomi lebih cepat.<sup>32</sup> Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

---

<sup>31</sup>Julius R. Latamaerissa, *Perekonomian IndonesiadanDinamika Global, edisi 1* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 50.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 56

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja (*man power*) terdiri atas dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labour force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja (*unlabour force*) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atau jasa kerjanya.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu negara, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labour force participation rate*) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja.

## **b. Teori Ketenaga Kerjaan**

Salah satu yang bisa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan

penawaran kerja pada suatu tingkat upah. Ada dua teori yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.

a) Teori Lewis

Apabila kelebihan pekerjaan merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah.<sup>33</sup> Kelebihan pekerjaan suatu sektor akan memberikan adil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan sektor lain. Ada dua sektor perekonomian negara perkembangan yaitu, sektor kapitalis dan sektor subsisten terbelakang, menurut Lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran. Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerjaan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha dipertanian untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industri alih daya kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang diserap. Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerjaan di sektor industri modern, maka pada suatu tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Jadi dapat disimpulkan menurut Lewis yaitu adanya kelebihan

---

<sup>33</sup>Masyhuri, Macfud, *Op. Cit.*, hlm. 173

penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi.<sup>34</sup>

#### b) Teori Fei-Ranis

Teori Fei-Ranis adalah berhubungan atau berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alam belum dapat diolah, sebagian besar penduduk bergerak di sektor pertanian, banyaknya pengangguran, tingkat pertumbuhan yang tinggi.<sup>35</sup>

#### c. Tenaga Kerja Dalam Islam

Tenaga kerja dalam Islam merupakan faktor produksi dengan teori produksi adalah imam al-ghazali. Beliau telah menguraikan faktor-faktor produksi dan fungsi produksi dalam kehidupan manusia. Dalam uraiannya beliau sering menggunakan kata kasab dan istilah yang berarti usaha fisik yang dikerahkan manusia dan yang kedua adalah upaya manusia untuk mengelola dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi. Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan bermacam ragam aktivitas produksi dalam masyarakat termasuk hakikatnya. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos kerja Islam.<sup>36</sup> Memandang arti pentingnya dalam penciptaan kekayaan, Islam telah menaruh perhatian yang besar

---

<sup>34</sup>Masyhuri, Macfuddz & M, Nurhadi Sujoni, *Op. Cit.* hlm. 173

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 202

<sup>36</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Kelima* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 128.

terhadap tenaga kerja. Al-Qur'an kita suci Islam, mengajarkan prinsip mendasar mengenai tenaga kerja, ketika kitab suci itu mengatakan dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qashash ayat 77.

نَالِدُنِيَامِنَ نَصِيْبِكَ تَنَسَ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُءَاتَنكَ فِيمَا وَابْتَغِ  
 نَتُحِبُّ لَا اللَّهُ إِن الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسَنَ  
 الْمُفْسِدِ

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>37</sup>

Maksud dari ayat di atas memberikan isyarat bahwa pemberian kerja sebagai orang yang dilebihkan Allah dari segi ekonomi berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai bentuk perbuatan baik sebagaimana yang di perintahkan oleh Allah pada ayat ini. Bentuk perbuatan baik tersebut diterapkan dalam bentuk perlindungan teknis, dan perlindungan ekonomis.

<sup>37</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Agung Harahap, 2006), hlm. 543.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam menguji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penulis. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Muhammad Nizar Dharmawan (Jurnal, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi PMA di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2016.	Tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PMA di Provinsi Jawa Barat, sedangkan infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PMA di Provinsi Jawa Barat
2	Abdul Maqin (Jurnal Trikonomika, Ekonomi Vol 10, No 1, Juni 2011) Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan, Bandung.	Pengaruh kondisi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.	Infrastruktur jalan mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, tetapi tidak signifikan.

3.	Muhammad Zaenuddin (Jurnal Jejak, Vol 2, No 2, September 2009) Politeknik Batam.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi PMA di Batam.	Banyak Faktor yang berpengaruh secara signifikan. Variabel <i>maintenance fee</i> , tenaga kerja dan ekspor secara statistic signifikan mempengaruhi aliran PMA di Batam. Variabel <i>rental rate</i> dan daya listrik tidak signifikan mempengaruhi aliran PMA di Batam.
4.	Ilham Paslah Batubara (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padang Sidempuan, 2019)	Pengaruh tenaga kerja, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA) teradap produk domestik bruto (PDB) di indonesia 1988-2017.	Tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto.
5.	Fitri Jayati Lubis (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padang Sidempuan, Tahun 2018)	Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara persial tidak ada pengaruh signifikan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan di atas. Perbedaannya dengan penelitian Muhammad Nizar Dharmawan terletak pada variabel X, yaitu PDRB, sedangkan pada penelitian ini adalah pengeluaran infrastruktur. Studi kasus penelitian Muhammad Nizar Dharmawan berada pada Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Indonesia, penelitian ini berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang

Sidimpuan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah variabel Y yaitu penanaman modal asing.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Maqin juga berbeda dengan penelitian ini adalah variabel Y, yaitu pertumbuhan Ekonomi, sedangkan penelitian ini variabel Y adalah PMA. Studi kasus penelitian Abdul Maqin berada pada Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Penelitian ini berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Padang Sidempuan. Persamaannya terletak pada variabel X, yaitu infrastruktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaenuddin dengan penelitian ini. Perbedaannya pada variabel X yaitu ekspor, sedangkan variabel X penelitian ini adalah pengeluaran infrastruktur. Studi kasus penelitian Muhammad Zaenuddin berada pada Politenik Batam, penelitian ini berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidimpuan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada variabel Y yaitu investasi PMA.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Ilham Paslah Batubara dengan penelitian ini adalah variabel X, yaitu tenaga kerja, sedangkan penelitian ini adalah variabel X yaitu pengeluaran infrastruktur. Persamaannya studi kasus penelitian yaitu Ilham Paslah Batubara berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidimpuan sama dengan penelitian ini berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidimpuan.

Perbedaan dengan penelitian Fitri Jayati Lubis terletak pada variabel X, yaitu Investasi, sedangkan pada penelitian ini adalah pengeluaran

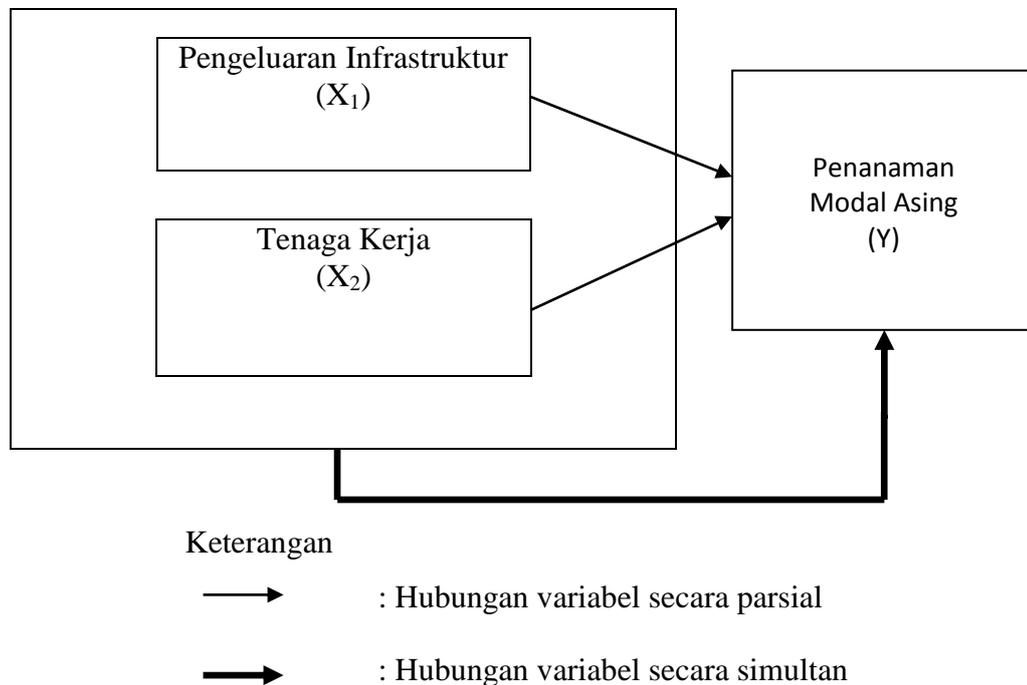
infrastruktur. Studi kasus penelitian Fitri Jayati Lubis berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan sama dengan penelitian ini berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Di dalam kerangka pikir akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menangkap, menerangkan, dan menunjuk perspektif terhadap masalah penelitian.

Dalam penelitian ini difokuskan pada Penanaman Modal Asing, Pengeluaran Infrastruktur, serta Tenaga Kerja yang berada di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Adanya peningkatan pada infrastruktur serta jumlah tenaga kerja akan memberikan pengaruh positif terhadap penanaman modal asing yang ada di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan penanaman modal asing secara otomatis akan meningkatkan sumber pembiayaan daerah yang digunakan untuk memperbaiki pembangunan ekonomi baik secara lokal maupun nasional. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Gambar 1 berikut.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih perlu di uji kebenarannya melalui fakta-fakta atau jawaban atas problem secara teoritis. Pengujian hipotesis dapat menggunakan dasar fakta diperlukan suatu alat bantu, dan yang sering digunakan adalah analisis statistik.<sup>38</sup>

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah di kemukakan di atas, maka hipotesis yang di ambil dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>:** Terdapat pengaruh pengeluaran infrastruktur terhadap penanaman modal asing di Kabupaten/KotaProvinsi Jawa Barat.

**H<sub>2</sub>:** Terdapat pengaruh tenaga kerja terhadap penanaman modal asing di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

<sup>38</sup>Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 97.

**H<sub>3</sub>:** Terdapat pengaruh pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja secara bersamaan terhadap penanaman modal asing di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dengan mengambil data dari Provinsi Jawa Barat yang diambil melalui situs resmi bps yaitu [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Waktu penelitian ini berlangsung pada bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala *numerik* (angka), yang dapat dibedakan menjadi pengukuran interval dan pengukuran rasio.<sup>39</sup> Pengukuran interval adalah data yang menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengukuran rasio adalah data yang tergolong kedalam data kontinum tetapi juga mempunyai ciri tertentu.<sup>40</sup> Pengukuran dari penelitian ini menggunakan pengukuran rasio.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian (penelahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama.<sup>41</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penanaman modal asing, pengeluaran infrastruktur dan tenagakerja, yang

---

<sup>39</sup>Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 145.

<sup>40</sup>Suharsimi Supangat, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2009), hlm. 276.

<sup>41</sup>Andi Suupangat, *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Infereni, dan non Parametik* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik di Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2018.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan yang akan diteliti.<sup>42</sup> Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.<sup>43</sup> Meliputi data penanaman modal asing, pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja yang dipublikasikan melalui Badan Pusat Statistik Jawa Barat website resmi [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) tahun 2012-2018. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 sampel.

## D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.<sup>44</sup> Data diambil dari BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Teknik Kepustakaan

Uraian yang berisi tentang teori dan praktik yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk membahas relevansi antara teori dan

---

<sup>42</sup>Dwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS* (Yogyakarta: Mediakom, 2008), hlm. 9.

<sup>43</sup>Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Grama Publishing, 2013), hlm. 76.

<sup>44</sup>Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit.*, hlm. 148.

praktik.<sup>45</sup> Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber buku-buku, jurnal dan skripsi terkait dengan variabel penelitian yang dicantumkan dalam landasan teori.

## 2. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan instrumen dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber pada tulisan, dimana peneliti menyelidik benda-benda tertulis seperti buku, majalah dokumen, dan lain-lain.<sup>46</sup>

## F. Analisis Data

Sebuah data yang terkumpul dari hasil pengumpulan data. Maka akan dilakukan analisis data atau pengolahan data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode *Eviews 9*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pemilihan model estimasi data panel

Data panel atau *pooled data* merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Ada tiga metode yang biasa digunakan untuk bekerja dengan data panel, sebagai berikut.<sup>47</sup>

#### a. *Common effect*

Metode estimasi dengan *common effect* tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* dan *time series*. Sebelum

---

<sup>45</sup> Hendry Tanjung Dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam edisi kedua*, (Depok: Gramata Publishing, 2013), hlm. 57.

<sup>46</sup> Syryani dan Hendriyadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 201.

<sup>47</sup> Setiawan dan Dwi Endah Kuswuri, *Ekonomimetrika* (CV. Andi Offist, 2010), hlm.184-189.

membuat regresi yang harus dilakukannya itu menggabungkan data *cross section* dengan data *time series*. Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi model dengan *common effect*.

b. *Fixed effect*

Teknik *Fixed effect* adalah teknik mengestimasi data panel yang memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted variables*, yang mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*. Model dengan *Fixed effect* menambahkan variabel *dummy*.

c. *Random Effect*

Dalam model acak (*random effect*), parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan kedalam *error*. Karena hal inilah, model acak efek juga disebut komponen *error*. Dengan menggunakan model acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan model efek tetap.

Tiga macam metode analisis diatas merupakan asumsi yang ditetapkan dalam melakukan estimasi terhadap data panel, untuk menentukan teknik mengestimasi regresi data panel yang tepat ada tiga uji yang digunakan sebagai berikut:

a) Uji chow, digunakan untuk memilih antara *model common effect* tanpa variabel *dummy* atau *fixed effect*. Hipotesis dalam uji chow adalah

dengan membandingkan perhitungan nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil nilai nilai chi-square hitung > nilai chi-square tabel, maka  $H_0$  ditolak yang berarti model yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect model*. Begitu pula dengan sebaliknya, jika nilai chi-square hitung < nilai chi-square tabel maka  $H_0$  diterima dan model yang lebih tepat digunakan adalah *common effect model*.

- b) Uji hausman, digunakan untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect*. Statistik uji hausman ini mengikuti distribusi statistik chi-square dengan *degree of freedom* sebanyak  $k$ , dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik hausman > dari nilai kritisnya, maka  $H_0$  ditolak dan model yang lebih tepat adalah *model fixed effect* sedangkan apabila sebaliknya digunakan *model random effect*.
- c) Uji langrange multiplier, digunakan untuk memilih atau *commont effect* atau *random effect*. Uji langrange multiplier ini didasarkan pada distribusi chi squares dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai langrange multiplier statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi squares, maka  $H_0$  ditolak, yang artinya estimase yang tepat untuk model regresi data panel adalah *random effect* dari pada metode *common effect*. Sebaliknya jika nilai langrange multiplier statistik lebih kecil dari nilai nilai statistik chi square sebagai nilai kritis, maka  $H_0$  diterima, maka model yang lebih

tepat digunakan dalam regresi data panel adalah *metode commont effect*.

## 2. Pengujian Asumsi Klasik

### 1) Uji Normalitas

Ujnormalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi norma. Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu *uji Jarque Bere*. Kriteria yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah apabila hasil perhitungan *Jarque Bere* > 0,05 maka berdistribusi normal dan sebaliknya.

### 2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi dimana terdapat hubungan linear antara variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel dependen). Multikolinearitas muncul jika di variabel independen memiliki kolerasi yang tinggi. Untuk menguji masalah multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan *auxiliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah membandingkan nilai  $R^2$  regresi utama dengan  $R^2$  regresi auxiliary. Apabila nilai  $R^2$  regresi utama >  $R^2$  regresi auxiliary maka didalam model tidak terjadi multikolinearitas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam model regresi populasi tidak memiliki varians yang sama, melihat pola residual dari estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan, maka tidak ada heteroskedastisitas. Akan tetapi jika residual membentuk suatu pola tertentu maka hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

Untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas pertama, maka dilakukan uji *White Heteroskedastisitas* jika nilai  $Obs^* R\text{-Squared}$  > dari  $X^2$  tabel. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. Uji Hipotesis

#### 1) Uji Parsial (t-test)

Uji t ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut: Jika  $t_{hitung} < - t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > + t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.<sup>48</sup>

#### 2) Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Firdaus, *Ekometrika Suatu Pendekatan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 147.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

#### 4. Uji Koefisien Determinasi $R^2$

Uji koefisien determinasi  $R^2$  atau ( $R^2$  *adjusted*), untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabeln dependen dijelaskan oleh variabel independen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 1, akan semakin baik.

#### 5. Analisis Regresi Berganda Data Panel

Regresi berganda Data Panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel atau data yang terdiri atas beberapa variabel seperti pada data seklisilang. Adapun pengertian lain data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Dalam penelitian ini yang merupakan data *time series* yaitu 2012 – 2018 sedangkan *cross section*nya adalah 5 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Adapun model regresi data panelnya yaitu :<sup>50</sup>

$$y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + b_n X_{ni} + e_{it}$$

keterangan:

Y :Dependen Variabel

a :Konstanta

$b_1$  :Koefisien Regresi  $X_1$ ,  $b_2$ =Koefisien Regresi  $X_2$ , dan seterusnya.

e :Residual/error.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Moch. Doddy Ariefianto, *Ekonomi Metrika Esensi dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews*, (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm. 17.

<sup>51</sup>Agus Tri Basuki Dan Nano Prawoto, *Analisis Regersi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

Lalu rumus di atas diturunkan kembali ke dalam rumus sebagai berikut:

$$PMA_{it} = \alpha + \beta_1 PI_{it} + \beta_2 TK_{it} + e$$

**Keterangan :**

PMA	= Penanaman Modal Asing
$\alpha$	= Konstan
$\beta_1, \beta_2$	= Koefisien regresi
PI	= Pengeluaran Infrastruktur
TK	= Tenaga Kerja
e	= Error
i	= Entitas ke-i
t	= Periode ke-t

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat**

#### **1. Sejarah Singkat Provinsi Jawa Barat**

Sejarah berdirinya Provinsi Jawa Barat pada ke 5 wilayah Jawa Barat merupakan again dari kerajaan Tarumanegara, dibuktikan melalui banyaknya prasasti Tarumanegara yang tersebar di wilayah Jawa Barat dimana terdapat 7 prasasti dalam aksara Weni dan Sansekerta yang menceritakan cerita kerajaan Taruma negara. Secara administratif, Jawa Barat sebagai provinsi dimulai Tahun 1925 ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi. Pembentukan tersebut dilaksanakan tahun 1922 yang membagi wilayah Hindia Belanda menjadi kesatuan daerah-daerah Provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah tatar soenda atau pasundan.<sup>52</sup>

Berdasarkan data sejarah (*Staatsblad* Nomor 378 tanggal 14 Agustus 1925), Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda). Pembentukan Provinsi Jawa Barat tersebut, nama resminya *West Java Provinci* bagi kalangan Belanda atau formal pemerintah colonial Hindia Belanda dan Pasundan bagi kalangan orang bumi putera, dimaksudkan untuk melaksanakan janji pemerintah kerajaan Belanda (1901) yang akan memberikan hak otonomi kepada pemerintah Indonesia. Tahun-tahun

---

<sup>52</sup>Badan Pusat Statistik, *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2012* (Bandung: BPS, 2012), hlm. 10.

berikutnya baru dibentuk Provinsi Jawa Tengah (*Midden Java Provinci*) dan Provinsi Jawa Timur (*Oost Java Province*).<sup>53</sup>

## 2. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten/Kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, sedangkan jumlah kecamatan sebanyak 627 kecamatan, daerah perkotaan 2.672 dan 3.291 perdesaan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah di Jawa Barat pada tahun 2017 sebanyak 331.327 orang yang terdiri dari Golongan I 4.451 orang, Golongan II 50.779 orang, Golongan III 160.940 orang dan Golongan IV 115.157 orang. Jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menurut Partai Politik pada tahun 2017, Laki-laki sebanyak 78 orang sedangkan Perempuan 22 orang. Dengan komposisi tiga terbesar adalah fraksi Partai Demokrasi Perjuangan sebanyak 20 orang, fraksi Partai Golongan Karya 17 orang dan fraksi partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera masing-masing sebanyak 12 orang.<sup>54</sup>

Kondisi geografis yang strategis merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari aspek komunikasi dan perhubungan. Kawasan Utara merupakan daerah berdataran rendah, sedangkan kawasan Selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan Tengah. Dari data sejarah tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat yang meliputi: Karesidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan dan Cirebon.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>54</sup>Badan Pusat Statistik, *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2014* (Bandung: BPS, 2014), hlm. 2.

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5o50`-7o50` Lintang Selatan dan 104o48`-108o48` Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya

- a. Utara, berbatasan dengan provinsi Laut Jawa dan DKI Jakarta.
- b. Timur, berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah.
- c. Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- d. Barat, berbatasan dengan provinsi Banten.<sup>55</sup>

### **3. Kondisi Demografis Provinsi Jawa Barat**

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 43.053.732 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 28.282.915 jiwa (65,69 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 14.770.817 jiwa (34,31 persen). Persentase distribusi penduduk menurut Kabupaten/Kota bervariasi dari yang terendah sebesar 0,41 persen di Kota Banjar hingga yang tertinggi sebesar 11,08 persen di Kabupaten Bogor.

Penduduk laki-laki provinsi Jawa Barat sebanyak 21.907.040 jiwa dan perempuan sebanyak 21.146.692 jiwa. Seks rasio adalah 104, berarti terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Seks rasio menurut Kabupaten/Kota yang terendah adalah kabupaten Ciamis sebesar 107. Seks rasio pada kelompok kabupaten Cianjur sebesar 107. Seks rasio pada kelompok umur 5-9 sebesar 106, kelompok umur lima tahun dari 10 sampai 64 berkisar antara 97 sampai dengan 113, dan kelompok umur 65-69 sebesar 96.

Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 51,20. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 48,84 sementara di daerah perdesaan 55,84 sementara di daerah perdesaan 55,92.<sup>56</sup>

#### **4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan wilayah domestik suatu Negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang dihitung atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB Provinsi Jawa Barat atas dasar harga konstan pada tahun 2018 sebesar Rp.1.419.689.115,90. Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki potensial yang sangat luas dan potensial yang dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar dari wilayah ini merupakan areal industri pengolahan, oleh karena itu kegiatan terpenting perekonomian masih mengandalkan sektor industri pengolahan. Disamping itu, laut, danau dan sungai juga merupakan potensi yang tidak kalah pentingnya. Ini digunakan sebagai potensi perikanan, perhubungan, industri, perdagangan, dll. Dengan demikian, struktur lapangan usaha sebagian besar masyarakat Provinsi Jawa Barat berada pada sektor lapangan usaha

---

<sup>56</sup>Sensus Penduduk, *Provinsi Jawa Barat Badan Pusat Statistik Indonesia*, 2013.

pertanian, kehutanan dan perikanan. Jumlah PDRB dan distribusi PDRB menurut lapangan usaha Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah PDRB Dan Distribusi PDRB**  
**Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat Tahun 2018**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>PDRB (Juta Rupiah)</b>	<b>Distribusi PDRB (%)</b>
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	101.777.202,76	8,67
Pertambangan dan Penggalian	25.496.225,87	1,36
Industri Pengolahan	616.441.684,99	42,16
Pengadaan Listrik dan Gas	5.438.947,93	0,56
Air, Pengelola Sampah, Limbah	1.134.533,19	0,09
Konstruksi	119.305.155,02	8,44
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	216.613.826,81	14,87
Transportasi dan Pergudangan	67.701.976,39	5,69
Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	38.160.143,18	2,78
Informasi dan Komunikasi	58.420.751,33	2,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	35.727.388,51	2,79
Real Estate	17.663.387,11	1,06
Jasa Perusahaan	6.284.130,74	0,42
Administrasi pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	27.360.564,73	2,37
Jasa Pendidikan	40.075.480,26	3,03
Jasa Kesehatan	11.369.959,23	0,76
Jasa Lainnya	30.717.757,85	2,08
<b>PDRB</b>	<b>1.419.689.115,90</b>	<b>100.000</b>

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), datadiolah

## B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

### 1. Penanaman Modal Asing

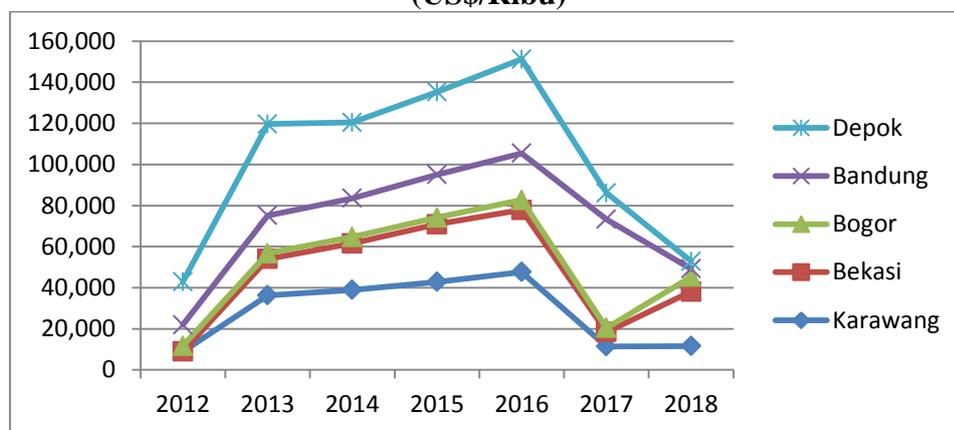
Menurut UU No. 1 Tahun. 1967 dan UU No. 11 Tahun. 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA)

adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Bentuk modal asing adalah bentuk valuta asing, alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia, dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pemilik modal asing dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

- 6) Negara asing, merupakan negara yang berasal dari luar negeri, yang menanamkan investasinya di Indonesia.
- 7) Perseorangan warga negara asing, merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasi di Indonesia.
- 8) Badan usaha asing, merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum.
- 9) Badan hukum asing, merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Act yang berlaku di negara asing tersebut.
- 10) Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Perkembangan penanaman modal asing yang terjadi di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2018, dengan melihat perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun apakah mengalami kemajuan atau penurunan dalam penanaman modal asing.

**Gambar 4.1**  
**Penanaman Modal Asing di 5 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.**  
**(US\$/Ribu)**



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), data diolah

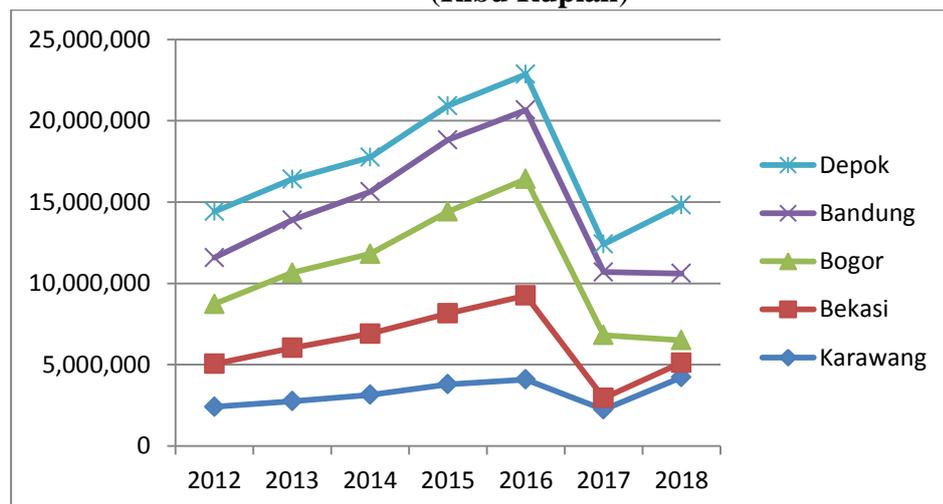
## 2. Pengeluaran Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi, yang sebenarnya sama pentingnya dengan faktor-faktor produksi umum lainnya yakni modal dan tenaga kerja. Namun untuk satu faktor ini, selama ini terutama sejak krisis ekonomi 1997/1998, kurang sekali perhatian pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, khususnya di wilayah di luar Jawa, atau kawasan Indonesia. Hal ini karena setelah krisis pemerintah harus fokus pada hal-hal yang lebih mendesak seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ekonomi secara keseluruhan, mencegah pelarian modal, menanggulangi hutang luar negeri serta menstabilkan kembali kondisi politik dan sosial. Akibatnya, kondisi infrastruktur terpuruk di

mana-mana. Mutu infrastruktur di Indonesia menduduki peringkat terendah di kawasan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi asing, pengentasan kemiskinan dan mutu lingkungan hidup.

Pertumbuhan pengeluaran infrastruktur yang terjadi di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2018, dengan melihat perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun apakah mengalami kemajuan atau penurunan dalam pengeluaran infrastruktur.

**Gambar 4.2**  
**Pengeluaran Infrastruktur di 5 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.**  
**(Ribu Rupiah)**



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), data diolah

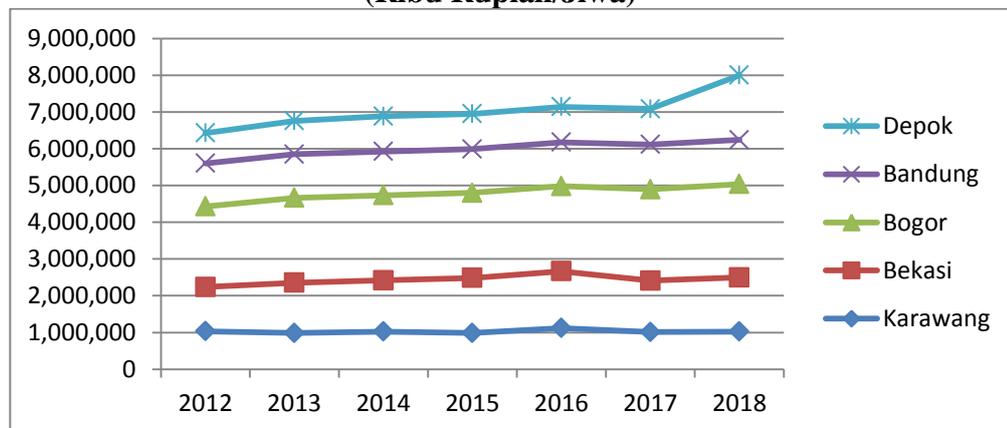
### 3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan dan mampu untuk bekerja serta memenuhi persyaratan peraturan perburuhan suatu negara. Luasnya lapangan kerja yang tersedia akan ditentukan oleh kebijakan investasi produksi yang dihasilkan dan cara pembangunan yang diterapkan apakah *labour intensive* atau *capital*

*intensive* serta besarnya modal yang diinvestasikan. Lapangan kerja yang ada di negara-negara yang sedang berkembang sangat terbatas akibat daripada kebijaksanaan investasi, produksi yang dihasilkan, besarnya modal yang diinvestasikan, dan situasi perekonomian nasional dan internasional. Kebijakan investasi yang dilakukan pada masa lalu ditunjukkan kepada sektor pertanian demi kepentingan negara penjajah, sedangkan lapangan kerja yang tercipta pada sektor ini sangat kecil. Produksi yang dihasilkan adalah produksi primer dari pertanian dan ekstraktif mineral dari pertambangan yang proses produksinya pendek, sehingga lapangan kerja yang tercipta sedikit.<sup>57</sup>

Pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012-2018, dengan melihat perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun apakah mengalami kemajuan atau penurunan dalam tenaga kerja.

**Gambar 4.3**  
**Tenaga Kerja di 5 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.**  
**(Ribu Rupiah/Jiwa)**



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), data diolah

<sup>57</sup>R. Latemarissa, Julius, *Op. Cit.* Hlm. 53-62.

## C. Hasil Estimasi

### 1. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dalam model regresi menggunakan data panel, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih model yang tepat. Regresi data panel memiliki tiga model. Pertama, *Common Effect Model (Pooled Least Square)* dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Kedua, *Fixed Effect Model* dan ketiga, *Random Effect Model* dengan menghitung *error* dari data panel menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*). Ketiga model tersebut diuji satu per satu, di bawah ini adalah hasil uji estimasi dari ketiga model tersebut.<sup>58</sup>

**Tabel 4.2**  
**Uji Model Estimasi**

Model	Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Common Effect	C	27.00921	7.406722	3.646581	0.0009
	LOG(PI)	-0.633102	0.440062	-1.438665	0.1600
	LOG(TK)	-0.574002	0.217808	-2.635364	0.0129
Fixed effect	C	17.04465	8.509727	2.002961	0.0549
	LOG(PI)	-0.146729	0.453192	-0.323767	0.7485
	LOG(TK)	-0.381244	0.243425	-1.766165	0.1285
Random Effect	C	20.26506	7.883086	2.570701	0.0150
	LOG(PI)	-0.296457	0.431601	-0.686877	0.4971
	LOG(TK)	-0.451581	0.226852	-1.990641	0.0551

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Setelah melakukan uji estimasi Tabel 4.2 di atas, selanjutnya dipilih model estimasi yang tepat, pemilihan model estimasi yang tepat dilakukan dengan menggunakan uji lainnya, yaitu *uji chow (Likelihood Ratio)*, *Hausman Test* dan *Uji LM (Langrange Multiplier)*.

<sup>58</sup>Shochrul Ajija, dkk, *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hlm. 50.

a. Uji Chow (*Likelihood Ratio*)

Uji pertama yang dilakukan dalam menentukan model estimasi terbaik adalah *uji chow*. Uji ini dilakukan untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect*.<sup>59</sup> Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

$H_0 = \text{common effect}$  model yang paling sesuai

$H_a = \text{fixed effect}$  model yang paling sesuai

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *chi-square* hitung dengan *chi-square* tabel.

$X_2 > X_2 \text{ tabel} = H_0$  di tolak

$X_2 < X_2 \text{ tabel} = H_0$  diterima

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: FE  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.581422	(4,28)	0.0176
Cross-section Chi-square	14.461638	4	0.0060

Sumber: Hasil Pengolahan Data ,2020.

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji *chow* di atas, dapat dilihat bahwa nilai *chi-square* yang diperoleh adalah 14.461638 lebih besar dari nilai *chi-square* tabel 9.488, sehingga *chi-square* yang diperoleh lebih besar daripada *chi-square* tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan

<sup>59</sup>*Ibid.*, Hlm. 55

$H_0$  ditolak. Hasil dari uji ini menyatakan bahwa model yang paling sesuai antara *common effect* dan *fixed effect* adalah *fixed effect*.

b. *Hausman Test*

Uji selanjutnya dalam menentukan model estimasi terbaik adalah *hausman test*. Dalam uji ini model yang akan dibandingkan adalah *random effect* dan *fixed effect*.<sup>60</sup> Hipotesis yang akan digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

a) Jika  $H_0 =$  diterima, maka model *Random effects*

b) Jika  $H_0 =$  ditolak, maka model *fixed effects*

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *chi-square* tabel.

$X_2 > X_2 \text{ t}_{\text{tabel}} = H_0$  di tolak

$X_2 < X_2 \text{ t}_{\text{tabel}} = H_0$  diterima<sup>61</sup>

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Hausman Test**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.343178	2	0.5109

Sumber: Hasil Pengolahan Data ,2020.

Berdasarkan tabel 4.4 uji hausman di atas, dapat dilihat bahwa nilai *chi-square* yang diperoleh adalah 1.343178 lebih kecil dari nilai *chi-square* tabel 5,591, sehingga *chi-square* yang diperoleh lebih besar dari

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 55

<sup>61</sup>Jaka Sriyana, *Metode Regresi Data Panel Edisi Pertama Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2014), hlm. 187.

pada nilai *chi-square* tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil dari uji ini dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai antara *Random effect* dan *fixed effect* adalah *fixed effect*.

c. Uji LM

Untuk menentukan model terbaik estimasi terakhir, uji selanjutnya yang dilakukan adalah uji LM (*Lagrange Multiplier*), uji ini dilakukan untuk membandingkan antara *Common Effects* dan *Random Effects*.

Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  = *Common Effects* yang paling sesuai

$H_a$  = *Random Effects* yang paling sesuai

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Test Hypothesis-Cross-section* dengan *alpha*, dengan ketentuan sebagai berikut:

*Test Hypothesis-Cross-section* >  $\alpha$  =  $H_0$  ditolak

*Test Hypothesis-Cross-section* <  $\alpha$  =  $H_0$  diterima<sup>62</sup>

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-Section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.805358	1.287966	5.093324
	(0.0511)	(0.2564)	(0.0240)

Sumber: Hasil Output Eviews 9

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 184

Berdasarkan table 4.5 diatas menunjukkan nilai pada *Test Hypothesis-Cross-section* adalah 3,805358 lebih kecil dari *alpha* 0,0511, yang berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hasil uji menyatakan bahwa model yang paling sesuai antara *Common Effects* dan *Random Effects* adalah *Common Effects*. Uji terakhir ini menunjukkan bahwa dari ketiga uji yang telah dilakukan model estimasi yang paling sesuai adalah *Common Effects*.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan-ringkasan data seperti *mean*, standar deviasi, modus dan lain-lain.<sup>63</sup>

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Deskriptif**  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengeluaran infrastruktur	35	885000.0	7169234.	3460905.	1318666.
Tenaga kerja	35	19680.00	2537583.	1313991.	608587.9
valid N (listwise)	35				

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2020.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa variabel pengeluaran infrastruktur nilai dari jumlah data (N) adalah 35, nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp.3460905, kemudian nilai minimum sebesar Rp.885000.0, dan

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2013), hlm. 264.

nilai maximum sebesar Rp7169234, sedangkan standard deviasi sebesar Rp.1318666, dan tenaga kerja nilai dari data (N) adalah 35, nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp.1313991, kemudian nilai minimum sebesar Rp.19680.00, dan nilai maximum sebesar Rp.2537583, sedangkan standard deviasi sebesar Rp.608587.9.

Jadi kesimpulan secara *descriptive* bahwa nilai minimum pengeluaran infrastruktur lebih kecil dari tenaga kerja, kemudian nilai maximum pengeluaran infrastruktur lebih kecil dari tenaga kerja, selanjutnya nilai rata-rata pengeluaran infrastruktur lebih besar dari tenaga kerja, dan nilai standar deviasi pengeluaran infrastruktur lebih kecil dari tenaga kerja.

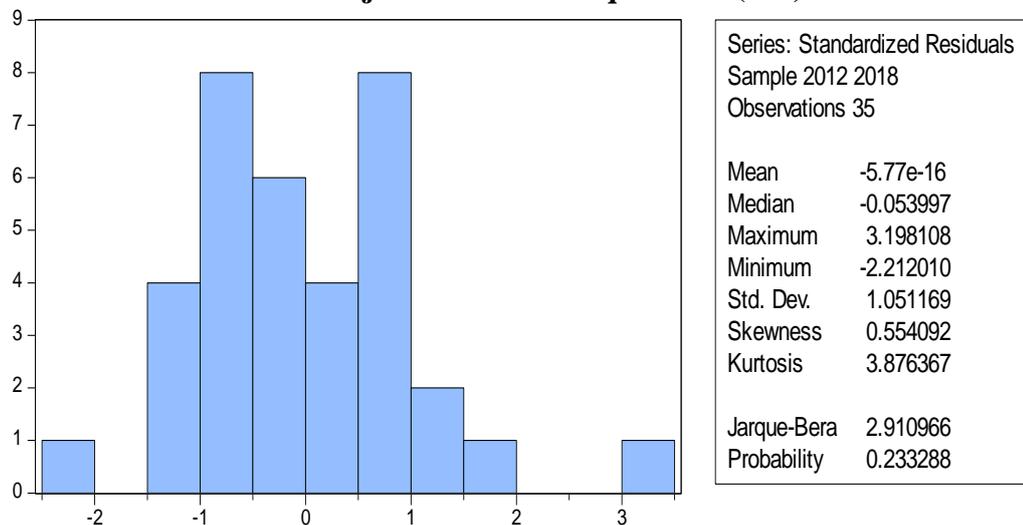
#### b. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan JB (*Jarque Bera*), sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalannya.<sup>64</sup> Untuk melihat apakah regresi data normal adalah jika nilai-nilai  $p \geq 0,05$  maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika  $p < 0,05$  maka diinterpretasikan sebagai tidak normal.

---

<sup>64</sup>Danang Sunyoto., *Op.Cit.*, Hal. 181.

**Gambar 4.4**  
**Uji Normalitas Jarque-Bera (J-B)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data ,2020.

Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Jarque-Berra* (JB) uji JB merupakan uji normalitas berdasarkan pada koefisien kemiringan (*Skewness*). Dalam uji JB normalitas dapat dilihat dari besaran nilai probality JB. Jika nilai *Probality* JB  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas JB sebesar 0,233288 karena nilai probabilitas JB  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah terdapat Suatu uji yang dilakukan untuk melihat korelasi antara masing-masing variabel bebas. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu multikolinearitas maka dapat diketahui dari nilai korelasi antara dua variabel bebas tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,8 maka

variabel bebas tersebut tidak memiliki suatu masalah atau persoalan multikolinearitas, begitu juga dengan sebaliknya.<sup>65</sup>

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

	Pengeluaran Infrastruktur	Tenaga Kerja
PENGELUARAN INFRASTRUKTUR	1.000000	-0.05541875473928478
TENAGA KERJA	-0.05541875473928478	1.000000

*Sumber: Hasil Pengolahan Data ,2020.*

Berdasarkan hasil tabel 4.7 uji multikolinearitas di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena koefisien antar variabel independen masih di bawah syarat adanya multikolinearitas yaitu 0,8 persen. Pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja mempunyai korelasi sebesar 0.05541875473928478. Korelasi ini berada di bawah 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut<sup>66</sup>

<sup>65</sup>Achmad Naufal Fachreza, *Analisis Penyerapan Tenaga Sektor Kontruksi di Kabupaten Provinsi Jawa Timur 2011-2015 Jurnal*, vol. 15, No. 2, 2017.

<sup>66</sup>Setiawan dan Dwi Endah Kuswuri, *Ekonometrika* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010), hlm. 82.

- Jika  $d$  lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4-dL)$ , maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- Jika  $d$  terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$ , maka hipotesis diterima, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
- Jika  $d$  terletak  $dL$  maka  $du$  atau diantara  $(4-dU)$  dan  $(4-dL)$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.478863	Mean dependent var	9.547555
Adjusted R-squared	0.367191	S.D. dependent var	1.184333
S.E. of regression	0.942128	Akaike info criterion	2.895506
Sum squared resid	24.85296	Schwarz criterion	3.206576
Log likelihood	-43.67135	Hannan-Quinn criter.	3.002887
F-statistic	4.288115	Durbin-Watson stat	1.898607
Prob(F-statistic)	0.003463		

*Sumber: Hasil Pengolahan Data ,2020.*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi tabel 4.8 uji diatas diperoleh nilai DW sebesar 1.898607 sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 (5%) dan jumlah data  $(n) = 35$  dan jumlah variabel  $(k) = 3$  diperoleh nilai  $dL$  sebesar 1,2833 dan  $dU$  sebesar 1,6528. dimana  $(4-dU)$  diperoleh hasil sebesar 2,7329, karena nilai  $DW = 1.898607$  terletak antara  $dU = 1,6528$  dan  $(4-dU) = 2,7329$ , dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila

variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

$H_0$  = Tidak terdapat heteroskedastisitas

$H_1$  = Terdapat heteroskedastisitas

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai *p-value* dibandingkan dengan nilai *alpha*. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$p\text{-value} > \alpha = H_a$  diterima

$p\text{-value} < \alpha = H_0$  ditolak

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.26506	7.883086	2.570701	0.0150
LOG(PI)	-0.296457	0.431601	-0.686877	0.4971
LOG(TK)	-0.451581	0.226852	-1.990641	0.0551

*Sumber: Hasil Pengolahan Data ,2020.*

Berdasarkan hasil tabel 4.9 uji heteroskedastisitas diatas nilai probabilitas dari kedua variabel lebih besar dari  $\alpha$  (*alpha*) 0,05, dimana Pengeluaran Infrastruktur (PI) sebesar 0,4971 dan Tenaga Kerja (TK) sebesar 0,0551 lebih besar dari 0,05 sehingga diperoleh hasil yaitu  $H_0$  diterima dan disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan membandingkan nilai probabilitas dengan nilai taraf signifikan 0,05. Dalam penelitian ini menggunakan dengan rumus  $df = n - k$ ,  $n$  adalah jumlah seluruh observasi dan  $k$  adalah banyaknya variabel dalam regresi termasuk variabel tak bebas. Dalam penelitian ini  $n$  berjumlah 35 dan  $k$  berjumlah 3, sehingga  $df$  yang diperoleh 32 pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05, nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,69389. Kreteria ujinya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > +t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- 2) Jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model estimasi *fixed effect*. Hasil uji estimasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.04465	8.509727	2.002961	0.0549
PI	-0.146729	0.453192	-0.323767	0.7485
TK	-0.381244	0.243425	-1.766165	0.1285

*Sumber: Hasil PengolahanData , 2020.*

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji hipotesis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh pengeluaran infrastruktur terhadap penanaman modal asing

Berdasarkan dari hasil uji t di atas diperoleh  $t_{hitung}$  pengeluaran infrastruktur sebesar 0.323767 dan nilai  $t_{tabel}$  1,69389, sehingga nilai  $t_{hitung}$  (0.323767),  $< t_{tabel}$  (1,69389), artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya bahwa pengeluaran infrastruktur tidak ada berpengaruh terhadap penanaman modal asing.

2) Pengaruh tenaga kerja terhadap penanaman modal asing

Berdasarkan dari hasil uji t diatas tenaga kerja berpengaruh terhadap penanaman modal asing, hal ini dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  (1,766165)  $> t_{tabel}$  (1,69389) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima hal ini berarti tenaga kerja berpengaruh terhadap penanaman modal asing.

b. Uji F (simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.<sup>67</sup>

$H_a$ : Terdapat pengaruh pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat.

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$ . Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05 derajat pembilang ( $dk_1$ ) dihitung menggunakan rumus  $k-1$ , dimana  $n$  adalah jumlah seluruh observasi dan  $k$  adalah jumlah seluruh variabel. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 dan jumlah variabel adalah 3, maka  $dk_1$  adalah 2 dan  $dk_2$  adalah 37. Nilai  $F_{tabel}$  yang diperoleh adalah 3,25 ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 90.

$F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} = H_0$  ditolak

$F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}} = H_0$  diterima

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji F**

F-statistic	4.288115	Durbin-Watson stat	1.898607
Prob(F-statistic)	0.003463		

Sumber: Hasil Pengolahan Data ,2020.

Berdasarkan tabel 4.11 uji F diatas, diperoleh nilai  $F_{\text{hitung}}$  sebesar 4,288115, nilai ini lebih besar dari nilai  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 3,29, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penanaman modal asing.

c. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam hal ini peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai *R-squared*.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.478863	R-squared	0.478863
Adjusted R-squared	0.367191	Adjusted R-squared	0.367191
S.E. of regression	0.942128	S.E. of regression	0.942128
F-statistic	4.288115		

Sumber: Hasil Pengolahan Data ,2020.

Berdasarkan tabel 4.12 uji di atas, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0.478863 hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja sebesar 47,88% persen. Sedangkan sisanya 52,12% persen di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

#### 4. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Regresi berganda digunakan untuk menguji signifikan ada atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui koefisien regresinya.<sup>68</sup> Model regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi variabel tak bebas.<sup>69</sup> Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai *dependent variable* (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh *independent variable* (X) terhadap *dependent variable* (Y).

Hasil estimasi yang diperoleh menggunakan *fixed effect* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Estimasi**

Dependent Variable: PMA  
Method: Panel Least Squares  
Date: 08/06/20 Time: 19:24  
Sample: 2012 2018  
Periods included: 7  
Cross-sections included: 5  
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.04465	8.509727	2.002961	0.0549

<sup>68</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2004), hlm. 107.

<sup>69</sup>Damodor N, Gujarati, *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid Kesatu* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 180.

PI	-0.146729	0.453192	-0.323767	0.7485
TK	-0.381244	0.243425	-1.766165	0.1285
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.478863	Mean dependent var	9.547555	
Adjusted R-squared	0.367191	S.D. dependent var	1.184333	
S.E. of regression	0.942128	Akaike info criterion	2.895506	
Sum squared resid	24.85296	Schwarz criterion	3.206576	
Log likelihood	-43.67135	Hannan-Quinn criter.	3.002887	
F-statistic	4.288115	Durbin-Watson stat	1.898607	
Prob(F-statistic)	0.003463			

*Sumber: Hasil Pengolahan Data ,2020.*

Dimana:

PMA : Penanaman Modal Asing

PI : Pengeluaran Infrastruktur

TK : Tenaga Kerja

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$(PMA) = a + b_1(PI) + b_2(TK) + e$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka diperoleh model regresi secara umum sebagai berikut:

$$PMA = 17.04465 - 0.146729 (PI) - 0.381244 (TK) + e$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta dalam persamaan penelitian ini adalah 17.04465 artinya pengeluaran infrastruktur (X1) dan tenaga kerja (X2) bernilai 0 maka jumlah penanaman modal asing hanya sebesar 17.04465 US\$/Ribu.
- b. Nilai koefisien pada regresi pengeluaran infrastruktur sebesar 0.146729 bernilai negatif artinya jika pengeluaran infrastruktur bertambah Rp. 1,

maka penanaman modal asing akan mengalami penurunan sebesar 0.146729 US\$/Ribu, dengan asumsi variabel dianggap tetap.

- c. Nilai koefisien pada regresi tenaga kerja sebesar 0.381244 bernilai negatif artinya jika tenaga kerja bertambah Rp. 1, maka penanaman modal asing mengalami peningkatan sebesar 0.381244 US\$/Ribu, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pengeluaran Infrastruktur dan Tenaga Kerja Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2018. Dari kedua *hasil uji common effect* dan *fixed effect*, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *fixed effect*. Kedua hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dua hasil menyatakan model estimasi *fixed effect* yang paling sesuai.

Nilai konstanta dalam persamaan penelitian ini adalah 17.04465 artinya pengeluaran infrastruktur (X1) dan tenaga kerja (X2) bernilai 0 maka jumlah penanaman modal asing hanya sebesar 017.04465US\$/Ribu. Nilai koefisien pada regresi pengeluaran infrastruktur sebesar Rp. 0.146729 bernilai negatif artinya jika pengeluaran infrastruktur bertambah Rp. 1, maka penanaman modal asing akan mengalami penurunan sebesar 0.146729 US\$/Ribu, dengan asumsi variabel dianggap tetap. Nilai koefisien pada regresi tenaga kerja sebesar Rp. 0.381244, bernilai negatif artinya jika tenaga kerja bertambah Rp. 1, maka penanaman modal asing mengalami peningkatan sebesar 0.381244 US\$/Ribu dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Hasil nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0.478863 hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja sebesar 47,88% persen. Sedangkan sisanya 52,12% persen di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing

Berdasarkan hasil uji t di atas diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $0.323767 <$  dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,69389 artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya bahwa pengeluaran infrastruktur tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Nizar Dharmawan yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PMA di Provinsi Jawa Barat”.

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa tahun kebelakang bahwa kondisi infrastruktur di 5Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2018 baik sehingga pengeluaran infrastruktur tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing.

b. Pengaruh tenaga kerja terhadap penanaman modal asing

Berdasarkan hasil uji t diatas diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $1,766165 >$  dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar  $1,69389$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap penanaman modal asing.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Zaenuddin yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi PMA di Batam ”.

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Zaenuddin banyak faktor yang berpengaruh secara signifikan, dimana tenaga kerja dan ekspor secara statistik signifikan mempengaruhi aliran PMA di Batam. Persamaan penelitian Muhammad Zaenuddin dengan penelitian ini dimana variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap penanaman modal asing.

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tenaga kerja secara simultan terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2018.

c. Pengaruh pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing.

Hasil uji diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $2.041443$ , nilai ini lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  sebesar  $3,29$ , sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing.

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat. Hal ini karena jumlah tenaga kerja yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi stabil dan aman sehingga tidak menjadi hambatan terhadap investasi yang akan masuk ke Jawa Barat yang membuat pengaruh tenaga kerja ke minat investasi ke Jawa Barat tidak terlalu berpengaruh. Sedangkan kondisi infrastruktur di Provinsi Jawa Barat baik sehingga tidak menjadi hambatan terhadap investasi yang akan masuk ke Provinsi Jawa Barat yang membuat pengaruh infrastruktur ke minat investasi tidak terlalu berpengaruh.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan institut agama Islam negeri padangsidempuan agar menghasilkan penelitian yang sempurna tidaklah mudah. Variabel bebas yang digunakan hanya dua, sehingga kurang maksimal dalam menjelaskan variabel terikat.

Meski terdapat berbagai keterbatasan, peneliti berusaha untuk tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan:

1. Berdasarkan uji t uji persial (uji-t) diperoleh  $t_{hitung} <$  dari nilai  $t_{tabel}$   $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya bahwa pengeluaran infrastruktur tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2018.
2. Berdasarkan uji persial (uji-t) diperoleh  $t_{hitung} >$  dari nilai  $t_{tabel}$   $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2018.
3. Berdasarkan uji simultan (uji F) diperoleh nilai  $F_{hitung}$ , nilai ini lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$ , sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2018.

### **B. Saran**

Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat dan diluar Provinsi Jawa Barat, karena peran infrastruktur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penanaman modal asing. Perhatian ini dapat ditunjukkan

dengan pengalokasian dana secara tepat agar penyediaan infrastruktur yang ada dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk dengan industri yang ada di dalamnya.

## 2. Untuk Masyarakat

Masyarakat sebaiknya tetap aktif dalam setiap kegiatan pembangunan infrastruktur karena dalam pembangunan ini masyarakat merupakan tokoh utama dalam keberhasilan suatu pembangunan.

## 3. Untuk Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya agar lebih dalam lagi membahas tentang pengaruh pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing dengan cara menggali lagi pengaruh apa saja yang dapat mempengaruhi pengeluaran infrastruktur dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing yang sudah dibuat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Naufal Fachreza. *Analisis Penyerapan Tenaga Sektor Kontruksi di Kabupaten Provinsi Jawa Timur 2011-2015 Jurnal*. Vol. 15.No. 2, 2017.
- Adiwarman Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- . *Ekonomi Mikro Islam Edisi Kelima*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Agus Irianto. *Statistik Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Andi Suupangat. *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Infereni, dan non Parametik*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Badan Pusat Statistik. *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2012*. Bandung: BPS, 2012.
- . *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2014*. Bandung: BPS, 2014.
- Damodor N, Gujarati. *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid Kesatu*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Agung Harahap, 2006.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, 2007.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Dwi Priyanto. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom, 2008.
- Eko, Suprayitno. *Ekonomi Islam, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005.
- Guritno Mangkoesoebroto. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2016.
- Hendri Tanjung dan Abrista Dewi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Grama Publisng, 2013.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2004.
- Julius R. Latamaerissa. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Glibal, edisi 1*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Masyhuri Macfuddz & M, Nurhadi Sujoni. *Teori Ekonomi Makro*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

- Merry Anitasari dan Ahmad Soleh. *Pengaruh Pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Vol. 3. 2. Ekonomi dan Bisnis, 2015.
- mudjarat kuncoro. *masalah, kebijakan dan politik ekonomi pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mudjarat Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Muhammad Firdaus. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (mikroekonomi dan makroekonomi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- . *pengantar ilmu ekonomi (mikroekonomi dan makroekonomi) edisi ketiga*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- . *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mkroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Reza Lainatul Rizky, dkk. *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia*. Vol. 8. 1. Universitas Negeri Malang, 2016.
- salim. *Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Samuelson. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Sensus Penduduk. *Provinsi Jawa Barat Badan Pusat Statistik Indonesia*, 2013.
- Setiawan dan Dwi Endah Kuswuri. *Ekonometrika*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010.
- . *Ekonomimetrika*. CV. Andi Offist, 2010.
- Shochrul Ajija, dkk. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2013.
- Suharsimi Supangat. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2009.
- suparmoko. *keuangan negara dalam teori dan praktek*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Syryani dan Hendriyadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- T. Gilarso. *Pengantar Ekonomi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Murni Lubis
2. Nama Panggilan : Murni
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Ajamu, 28 Febuari 1998
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Anak ke : 4 (empat) dari 7 (tujuh) Bersaudara
7. Alamat : Ajamu, Kabupaten Labuhan Batu
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telepon/ HP : 0823-6213-0391

### **B. IDENTITAS ORANG TUA**

- Nama Ayah : Sueb Lubis
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Nama Ibu : Nuraini Nasution
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### **C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

- SD : SD N 112206 Ajamu Panai Hulu Tamat Tahun 2010
- SMP : SMP NEGERI 1 Rantau Selatan Tamat Tahun 2013
- SMA : SMA NEGERI 1 Rantau Selatan Tamat Tahun 2016
- S-1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan  
Jurusan Ekonomi Syariah (ES) Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam (FEBI).

## LAMPIRAN 1: DATA PENELITIAN

### Penanaman Modal Asing di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (US\$/Ribu)

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bogor	167.863.757	1.626.669.924.000	310.369.100	2.056.908.750.000	4.151.793.100	1.907.904	4.954.720
Sukabumi	88.937.334	811.381.869.000	272.797.500	4.392.851.250.000	304.474.700	9.573.000	614.292
Cianjur	11.597.419	163.861.263.000	105.578.600	629.271.250.000	70.787.000	12.157.100	40.985
Bandung	105.477.782	628.121.433.000	62.505.300	477.685.000.000	152.391.100	4.632.900	377.414
Garut	0	10.020.315.000	11.340.400	200.785.000.000	67.654.400	3.159.700	170.508
Tasikmalaya	0	8.134.989.000	1.618.700	6.947.500.000	71.895.600.000	0	73.866
Ciamis	3.939.785	0	0	0	0	667.200	180
Kuningan	60.420.391	10.024.209.000	870.300	5.641.250.000	18.014.300	91.800	68.556
Cirbon	0	188.528.088.000	6.047.900	190.050.000.000	86.090.300	44.934.700	3.841.014
Majalengka	0	212.475.513.000	2.300.000	353.321.250.000	114.169.700	8.837.400	1.220.681
Sumedang	16.792.066	184.303.191.000	24.213.700	354.166.250.000	62.431.300	4.989.300	107.835
Indramayu	12.415.000	127.867.416.000	51.488.800	827.563.750.000	15.425.900	0	115.669
Subang	45.949.999	543.593.364.000	43.331.000	2.418.376.250.000	167.769.200	7.145.700	1.025.243
Purwakarta	396.398.511	6.136.647.564.000	1.195.926.400	4.939.275.000.000	838.597.300	76.712.900	5.828.543
Karawang	900.160.899	36.272.453.547.000	1.878.238.000	17.813.837.500.000	2.042.648.200	623.813.100	11.635.516
Bekasi	16.33.270.900	17.781.789.843.000	2.255.836.100	28.039.438.750.000	2.253.221.400	460.597.800	39.056.639
Bandung Barat	45.224.217	109.361.853.000	38.270.300	206.681.250.000	186.443.000	34.029.600	769.875
Pangandaran			0	0	0	0	12.060
Kota Bogor	88.638.183	83.031.705	14.367.700	264.878.750.000	16.807.500	3.223.400	272.509
Kota Sukabumi	1.433.720	9.600.000.000	0	75.607.500.000	0	0	930
Kota Bandung	67.107.951	183.836.466.000	18.085.500	6.914.310.000.000	145.802.600	8.497.700	269.060
Kota Cirbon	6.369.339	145.737.969.000	6.733.200	154.208.750.000	999.900	18.797.000	38.868
Kota Bekasi	48.649.337	17.781.798.843.000	34.846.700	821.216.250.000	180.152.400	44.869.700	3.697.707
Kota Depok	209.483.875	445.231.944.000	225.626.100	550.528.750.000	79.177.300	12.800.900	462.971
Kota Cimahi	20.341.183	0	1.500.000	30.322.500.000	800.0000	667.200	29.516
Kota Tasikmalaya	756.103	53.111.040.000	54.400	10.056.250.000	0	0	0
Kota Banjar	786.022	0	0	0	0	0	0

**TenagaKerja di Kabupaten/Kota ProvinsiJawa Barat  
(Ribu Rupiah)**

<b>Kab/kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bogor	2.193.981	2.131.478	2.315.176	2.083.234	14.358	2.351.753	2.356.875
Sukabumi	214.278	944.618	1.004.798	912.272	0	1.037.532	1.027.606
Cianjur	159.294	880.713	878.215	863.592	5.767	846.258	881.180
Bandung	1.171.551	1.407.503	1.192.770	1.438.365	4.207	1.584.391	1.575.661
Garut	168.188	922.194	943.727	945.768	30.270	1.044.137	1.018.544
Tasikmalaya	171.899	786.927	787.281	724.664	74	762.133	774.131
Ciamis	790.395	723.640	767.041	494.078	6	602.123	583.910
Kuningan	189.917	444.359	434.948	435.712	274	425.700	432.549
Cirbon	907.699	763.934	913.94	813.824	645	880.807	890.762
Majalengka	88.972	550.134	600.843	580.729	10.966	569.252	572.120
Sumedang	526.745	483.648	557.618	481.029	6.715	505.827	507.378
Indramayu	793.828	717.696	766.583	677.201	885	746.020	776.017
Subang	753.65	656.787	729.932	633.116	1.301	724.308	711.978
Purwakarta	140.693	360.398	375.455	371.443	7.748	392.747	395.512
Karawang	1.033.921	888.592	1.026.868	873.995	5.202	1.010.828	1.026.586
Bekasi	1.200.377	1.268.648	1.389.958	1.344.821	30.282	1.399.743	1.472.432
Bandung barat	194.221	1.055.422	585.465	563.252	776	671.847	683.877
Pangandaran	2.251	0	0	192.391	0	235.561	231.582
Kota bogor	268.543	403.628	415.162	400.983	260	448.386	471.775
Kota sukabumi	130.131	118.252	122.046	133.746	0	130.909	132.848
Kota bandung	121.120	1.055.422	1.096.799	1.084.989	1.573	1.116.529	1.107.986
Kota cirbon	158.320	129.208	130.927	126.821	120	142.246	148.033
Kota bekasi	107.582	1.063.637	1.120.471	1.081.936	2.096	1.266.692	1.325.953
Kota Depok	828.909	836.688	958.857	896.981	416	1.009.401	1.028.292
Kota Cimahi	187.215	231.379	244.278	257.105	6	272.017	273.955
Kota tasikmalaya	118.064	298.166	274.001	301.406	0	290.396	287.233
Kota banjar	155.203	73.424	79.287	77.929	0	84.032	85.113

**PengeluaranInfrastruktur di Kabupaten/Kota ProvinsiJawa Barat  
(Ribu Rupiah)**

<b>Kab/kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bogor	3.674.001.336	4.614.270.730	4.899.883.275	6.262.701.630	7.330.903.331.01	3.873.000	7.715.348.316.00
Sukabumi	1.999.104.665	2.442.127.472	2.773.710.012	2.993.831.028	3.680.241.806.48	799.499	3.780.351.109.00
Cianjur	1.973.180.986	2.152.133.853	2.587.215.696	2.817.311.676	3.489.692.234.17	535.232	3.441.995.715.55
Bandung	2.850.023.254	3.242.165.133	3.823.064.504	4.402.405.669	5.133.749.495.00	3.873.000	5.530.449.455.99
Garut	2.850.023.233	2.934.073.591	3.044.084.138	3.285.435.081	3.811.194.679.58	688.910	4.119.597.456.32
Tasikmalaya	1.829.410.194	2.165.004.333	2.416.942.285	2.351.883.913	3.532.220.051.00	406.334	2.877.161.070.24
Ciamis	1.839.000.682	2.184.752.025	2.007.151.406	2.142.244.399	2.488.438.683.00	222.938	2.241.909.550.49
Kuningan	1,434.011.695	1.624.727.704	1.804.797.895	2.120.759.715	2.663.883.507.00	346.954	2.357.709.500.93

Cirbon	2.033.136.939	2.324.459.361	2.566.975.328	2.830.893.761	3.751.312.261	557.754	3.198.121.679.06
Majalengka	1.525.924.588	1.727.794.211	2.010.112.734	2.301.758.327	2.815.768.268.16	513.783	2.987.358.687.50
Sumedang	1.467.551.208	1.685.174.428	2.050.349.912	2.236.625.792	2.549.405.756.62	553.275	2.399.792.562.08
Indramayu	1.843.450.693	2.120.262.966	2.548.894.651	3.031.442.256	3.285.374.750.93	577.594	3.173.800.625.00
Subang	1.481.609.293	1.777.946.918	2.169.100.505	1.979.423.407	2.873.029.008.89	234.641	2.440.748.102.62
Purwakarta	1.138.170.000	1.378.889.639	1.541.016.177	1.979.423.407	1.896.434.037.38	472.480	2.184.982.022.25
Karawang	2.416.221.176	2.762.122.438	3.151.309.950	3.800.189.338	4.040.037.450.00	2.252.000	4.364.375.852.11
Bekasi	2.639.023.961	3.276.762.013	3.761.215.939	4.356.924.348	5.654.601.110.54	700.000	5.794.424.184.79
Bandung barat	1.501.192.558	1.680.101.452	1.868.257.939	2.144.230.095	2.509.232.670.93	609.916	2.559.697.671.30
Pangandaran	-	-	517.938.317	1.145.479.267	1.051.428.266.26	118.011	1.109.373.838.44
Kota bogor	1.355.492.925	1.422.132.371	1.702.962.476	2.038.547.529	2.492.967.706.49	977.803	2.533.748.633.99
Kota sukabumi	674.879.856	837.454.351	917.115.742	1.025.944.236	1.282.942.514.85	359.024	1.225.971.639.88
Kota bandung	3.490.035.513	4.027.469.180	4.435.597.296	6.400.773.369	6.679.354.749.64	2.578.457	7.459.813.537.32
Kota cirebon	813.671.540	975.249.677	1.193.110.082	1.253.260.157	1.565.393.626.10	443.929	1.431.721.790.00
Kota bekasi	2.499.559.814	2.959.889.955	3.107.838.416	4.188.655.800	5.076.566.085.38	1.757.641	5.936.109.580.21
Kota Depok	1.371.444.185	1.883.372.158	1.868.257.640	2.534.771.029	3.537.819.171.52	1.712.000	2.998.429.827.43
Kota Cimahi	833.552.564	922.343.622	1.042.608.971	1.255.339.528	1.565.824.352.00	383.911	1.576.353.864.90
Kota tasikmalaya	1.035.009.274	1.311.026.243	1.456.076.332	1.371.404.813	1.905.192.844.15	354.840	1.689.793.982.02
Kota banjar	513.257.046	646.330.710	640.072.225	688.144.850	941.240.526.87	125.454	772.266.100.28

## LAMPIRAN 2: HASIL ESTIMASI

### 1. Uji Model Estimasi

Model	Vaeriabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Common Effect	C	27.00921	7.406722	3.646581	0.0009
	LOG(PI)	-0.633102	0.440062	-1.438665	0.1600
	LOG(TK)	-0.574002	0.217808	-2.635364	0.0129
Fixed effect	C	17.04465	8.509727	2.002961	0.0549
	LOG(PI)	-0.146729	0.453192	-0.323767	0.7485
	LOG(TK)	-0.381244	0.243425	-1.566165	0.1285
Random Effect	C	20.26506	7.883086	2.570701	0.0150
	LOG(PI)	-0.296457	0.431601	-0.686877	0.4971
	LOG(TK)	-0.451581	0.226852	-1.990641	0.0551

### 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.581422	(4,28)	0.0176
Cross-section Chi-square	14.461638	4	0.0060

### 3. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

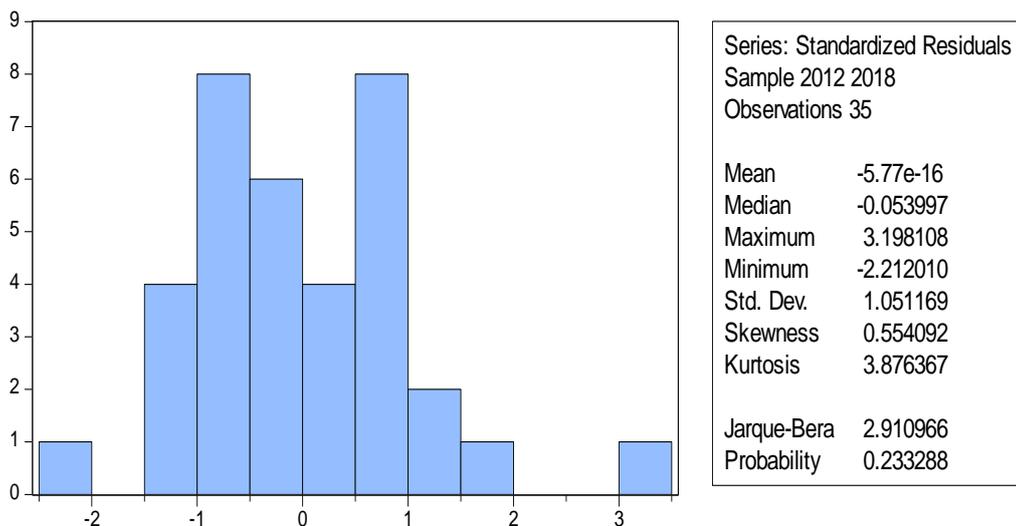
	Test Hypothesis		
	Cross-Section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.805358	1.287966	5.093324
	(0.0511)	(0.2564)	(0.0240)

#### 4. Hasil Uji Deskriptif

##### *Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LOG(Pengeluaran infrastruktur)	35	885000.0	7169234.	3460905.	1318666.
LOG(Tenaga kerja)	35	19680.00	2537583.	1313991.	608587.9
valid N (listwise)	35				

#### 5. Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera (J-B)



#### 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	Pengeluaran Infrastruktur	Tenaga Kerja
LOG(PENGELUARAN INFRASTRUKTUR)	1.000000	-0.05541875473928478
LOG(TENAGA KERJA)	-0.05541875473928478	1.000000

## 7. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.478863	Mean dependent var	9.547555
Sum squared resid	24.85296	Schwarz criterion	3.206576

## 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.26506	7.883086	2.570701	0.0150
LOG(PI)	-0.296457	0.431601	-0.686877	0.4971
LOG(TK)	-0.451581	0.226852	-1.990641	0.0551

## 9. Hasil Uji t

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	2.002961	0.0549
LOG(PI)	-0.323767	0.7485
LOG(TK)	-1.566165	0.1285

## 10. Hasil Uji F

F-statistic	4.288115	Durbin-Watson stat	1.898607
Prob(F-statistic)	0.003463		

## 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.478863	R-squared	0.478863
Adjusted R-squared	0.367191	Adjusted R-squared	0.367191
S.E. of regression	0.942128	S.E. of regression	0.942128
F-statistic	4.288115		

## 12. Hasil Estimasi

Dependent Variable: PMA  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 08/06/20 Time: 19:24  
 Sample: 2012 2018  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.04465	8.509727	2.002961	0.0549
PI	-0.146729	0.453192	-0.323767	0.7485
TK	-0.381244	0.243425	-1.566165	0.1285

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.478863	Mean dependent var	9.547555
Adjusted R-squared	0.367191	S.D. dependent var	1.184333
S.E. of regression	0.942128	Akaike info criterion	2.895506
Sum squared resid	24.85296	Schwarz criterion	3.206576
Log likelihood	-43.67135	Hannan-Quinn criter.	3.002887
F-statistic	4.288115	Durbin-Watson stat	1.898607
Prob(F-statistic)	0.003463		

## 13. Comon effect

Dependent Variable: PMA  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 08/06/20 Time: 19:23  
 Sample: 2012 2018  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.00921	7.406722	3.646581	0.0009
PI	-0.633102	0.440062	-1.438665	0.1600
TK	-0.574002	0.217808	-2.635364	0.0129
R-squared	0.212233	Mean dependent var	9.547555	
Adjusted R-squared	0.162998	S.D. dependent var	1.184333	
S.E. of regression	1.083520	Akaike info criterion	3.080124	
Sum squared resid	37.56853	Schwarz criterion	3.213440	
Log likelihood	-50.90217	Hannan-Quinn criter.	3.126145	
F-statistic	4.310574	Durbin-Watson stat	1.422793	
Prob(F-statistic)	0.021997			

## 14. Fixed Effect

Dependent Variable: PMA  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 08/06/20 Time: 19:24  
 Sample: 2012 2018  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.04465	8.509727	2.002961	0.0549
PI	-0.146729	0.453192	-0.323767	0.7485
TK	-0.381244	0.243425	-1.566165	0.1285

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.478863	Mean dependent var	9.547555
Adjusted R-squared	0.367191	S.D. dependent var	1.184333
S.E. of regression	0.942128	Akaike info criterion	2.895506
Sum squared resid	24.85296	Schwarz criterion	3.206576
Log likelihood	-43.67135	Hannan-Quinn criter.	3.002887
F-statistic	4.288115	Durbin-Watson stat	1.898607
Prob(F-statistic)	0.003463		

## 15. Random Effect

Dependent Variable: PMA  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 08/06/20 Time: 19:25  
 Sample: 2012 2018  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 35  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.26506	7.883086	2.570701	0.0150
PI	-0.296457	0.431601	-0.686877	0.4971
TK	-0.451581	0.226852	-1.990641	0.0551

### Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.693184	0.3512
Idiosyncratic random	0.942128	0.6488

### Weighted Statistics

R-squared	0.113153	Mean dependent var	4.362643
Adjusted R-squared	0.057725	S.D. dependent var	0.960545
S.E. of regression	0.932409	Sum squared resid	27.82039
F-statistic	2.041443	Durbin-Watson stat	1.756809
Prob(F-statistic)	0.146413		

---



---

Unweighted Statistics

---



---

R-squared	0.191158	Mean dependent var	9.547555
Sum squared resid	38.57361	Durbin-Watson stat	1.267061

---



---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sintang 22733  
Telepon (0634) 22980 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 192/In.14/G.1/PP.00.9/06/2019  
Lampiran :  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

54 Juni 2019

Yth Bapak/Ibu,  
1. Muhammad Arsyad Nasution : Pembimbing I  
2. Nurul Izzah : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Murni Lubis  
NIM : 1640200256  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Ilmu Ekonomi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Infrastruktur dan Tenaga Kerja Terhadap Penanaman Modal Asing di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2018.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.